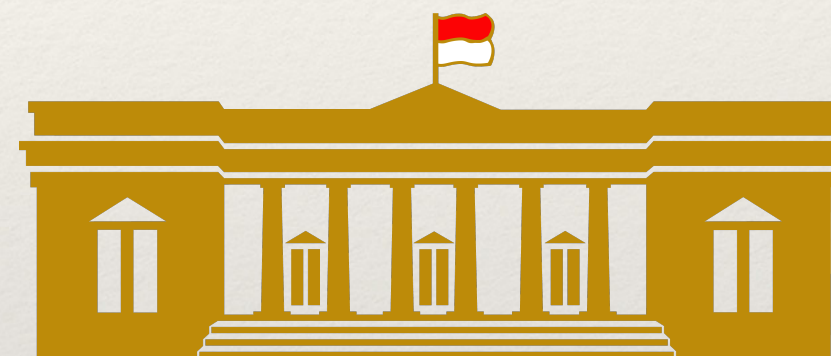

CAPAIAN 2 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK



KANTOR STAF PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ISI LAPORAN

PENGANTAR

Membumikan Visi Nawacita
Dari Fondasi ke Percepatan
Tiga Fokus Percepatan

I. INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN EKONOMI

5 Indikator Utama Capaian
Indikator I: Kemiskinan
Indikator II: Ketimpangan
Indikator III: Pengangguran
Indikator IV.A: Pertumbuhan Ekonomi
Indikator IV.B: Investasi Domestik dan Asing
Indikator V: Inflasi
Indikator lain: Utang Luar Negeri

II. TIGA FOKUS UTAMA

1. INFRASTRUKTUR

Peningkatan Anggaran dan Langkah Percepatan
Memersatukan Indonesia dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Mengurangi Ketimpangan Ekonomi
Berbagai Langkah Percepatan
Proyek Strategis yang Dipercepat

2. PEMBANGUNAN MANUSIA

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
Peningkatan Akses dan Infrastruktur Pendidikan
Penguatan Kebudayaan dalam Pendidikan
Peningkatan Produktivitas Melalui Pendidikan Vokasi
Mewujudkan Keluarga Indonesia Sehat
Program Nusantara Sehat
Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional

3. KEBIJAKAN DEREGULASI EKONOMI

Deregulasi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi
Deregulasi Kebijakan Ekonomi dan Peraturan Daerah
Perkembangan Penyederhanaan Perizinan
Dampak Yang Sudah Terjadi

III. TOPIK KHUSUS

A. DIPLOMASI INTERNASIONAL

Menciptakan Perdamaian Dunia
Melindungi WNI dan Menegakkan Kedaulatan NKRI
Kepemimpinan Regional dan Global

B. PARIWISATA

Menciptakan “10 Bali Baru”
Kinerja Pariwisata Nasional
Menjangkau Pasar yang Lebih Luas

C. PAPUA

Pendekatan Komprehensif untuk Papua
Pengakuan Terhadap Hak Komunal Tanah Adat
Perkembangan Infrastruktur untuk Menyatukan Papua
Peningkatan Produktivitas Melalui Pertanian dan Perdagangan

D. REFORMA AGRARIA

Tujuh Tujuan Reforma Agraria
Sasaran Reforma Agraria
Peta Jalan Reforma Agraria

E. POROS MARITIM

Trayek Bertambah, Harga Turun
Ekspor-Impor Efisien, Daya Saing Naik
Produksi dan Kesejahteraan Naik
Perubahan Mendasar dalam Kebijakan Kelautan Indonesia

F. PENGAMPUNAN PAJAK

Berdikari Membangun Negeri
Capaian Pengampunan Pajak Tertinggi di Dunia

G. DESA DAN KAWASAN 3T

Membangun Desa, Membangun Negeri
Pembangunan Jalan Perbatasan
KAWASAN 3T adalah Halaman Depan Wajah Indonesia

H. REFORMASI HUKUM

Revitalisasi dan Reformasi Hukum berdasarkan Nawacita
Penegakan Hukum: Kepolisian
Penegakan Hukum: Bea Cukai
Penegakan Hukum: Kejaksaan
Corruption Perception Index



PENGANTAR

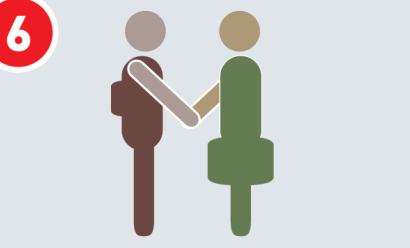
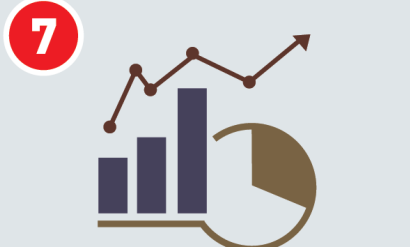
“ Nawacita adalah konsep besar untuk memajukan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Untuk mengubah dan mewujudkannya, diperlukan kerja nyata tahap demi tahap, dimulai dengan pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan di berbagai bidang. ”

Membumikan Visi Nawacita

Visi Pemerintahan Jokowi-JK telah dirumuskan dalam Nawacita, yang memiliki tiga ciri utama: **Negara Hadir, Membangun dari Pinggiran, dan Revolusi Mental.**



NAWACITA
JOKOWI - JK
UNTUK RAKYAT INDONESIA

 1 Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara	 2 Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya	 3 Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
 4 Menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	 5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia	 6 Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
 7 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor Sektor Strategis Ekonomi Domestik	 8 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa	 9 Memperteguh Ke-Bhineka-an dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Dari Fondasi Ke Percepatan

Pemerintah mempertahankan momentum pertumbuhan yang sudah dicapai berkat pembangunan fondasi di tahun sebelumnya, melalui peningkatan pembangunan yang berfokus pada 3 Pilar.

KEBIJAKAN FUNDAMENTAL



Mengubah Ekonomi berbasis
Konsumsi ke Produksi



Tepat sasaran untuk
pengentasan kemiskinan



Mendorong pembangunan yang
lebih merata di luar Pulau Jawa

Realokasi Subsidi BBM : **Rp 211,3 Triliun**

PROGRAM PRIORITAS

Belanja Pusat (Kementerian/
Lembaga)

Rp 113,9 Triliun

Belanja Daerah/Desa
Tertinggal

Rp 34,7 Triliun

KELAUTAN

**Rp 3,8
Triliun**

PERTANIAN

**Rp 16,9
Triliun**

PERHUBUNGAN

**Rp 21
Triliun**

PUPR

**Rp 33,3
Triliun**

PENDIDIKAN

**Rp 7,1
Triliun**

SOSIAL

**Rp 9,3
Triliun**

KESEHATAN

**Rp 2,7
Triliun**

Lain-lain
(BO
Kementerian
/ Lembaga) **Rp 19,8
Triliun**

Kesinambungan
Fiskal
**Rp 31,9
Triliun**

Subsidi Non Energi
**Rp 4,3
Triliun**

Bunga Hutang
**Rp 3,8
Triliun**

Lain-lain
**Rp 18,2
Triliun**

Subsidi Listrik
**Rp 4,5
Triliun**



“*Tahun 2016 ini dapat
disebut sebagai tahun
PERCEPATAN
pembangunan nasional*”

-Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi dalam rangka
HUT RI ke-71 di Gedung MPR/DPR/DPD RI,
Senayan, Jakarta

Tiga Fokus Percepatan

Pada tahun kedua, PERCEPATAN dilakukan dengan berfokus pada **Infrastruktur**, **Pembangunan Manusia**, dan **Kebijakan Deregulasi Ekonomi**.



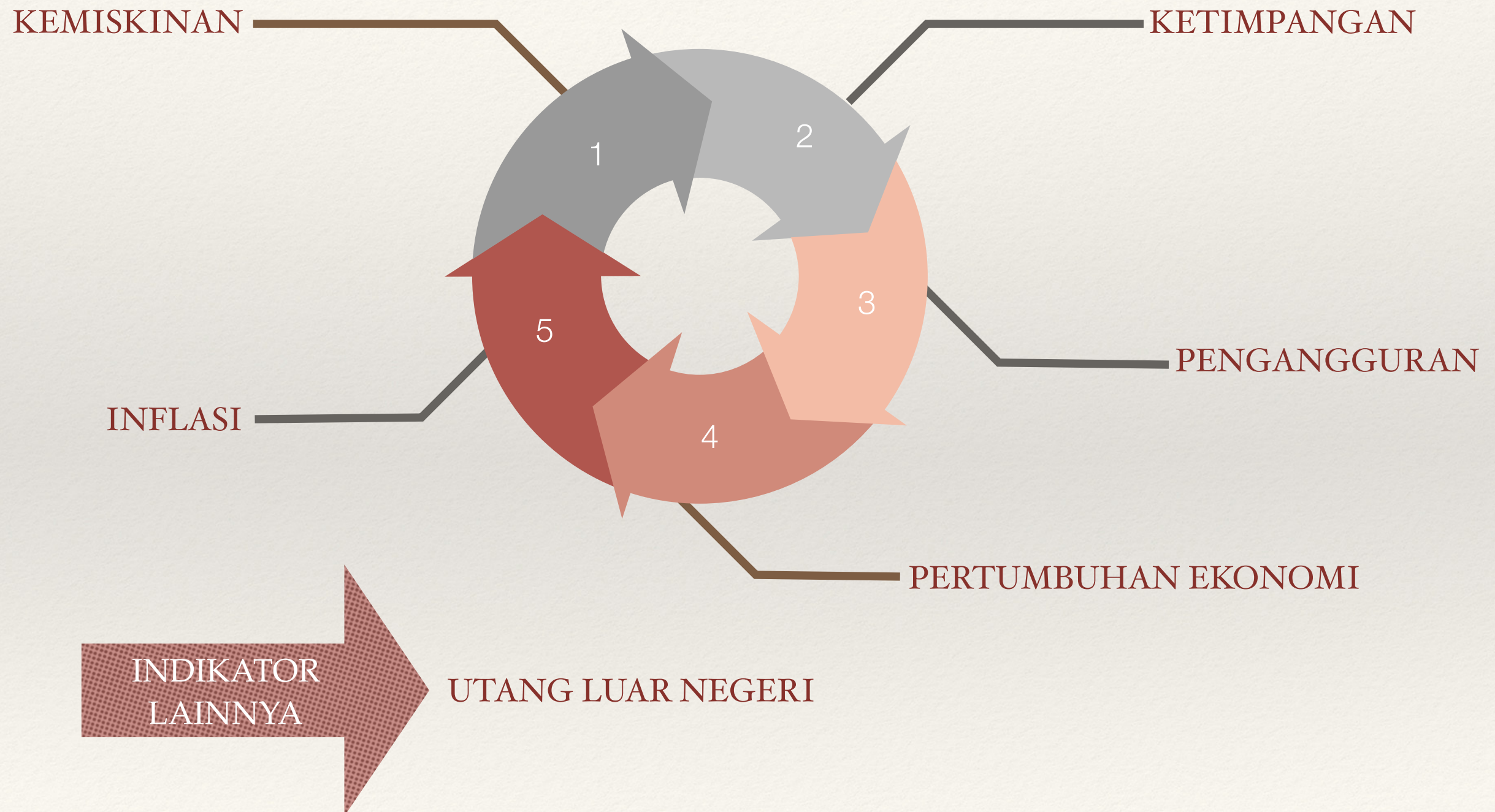


INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN EKONOMI

“ Untuk menjalankan visi pembangunan secara efektif, pemerintahan modern di manapun harus memiliki sejumlah capaian positif di bidang ekonomi. Hal ini sesungguhnya terkait erat dengan kesejahteraan rakyat yang merupakan subjek dan penerima manfaat terbesar pembangunan. ”

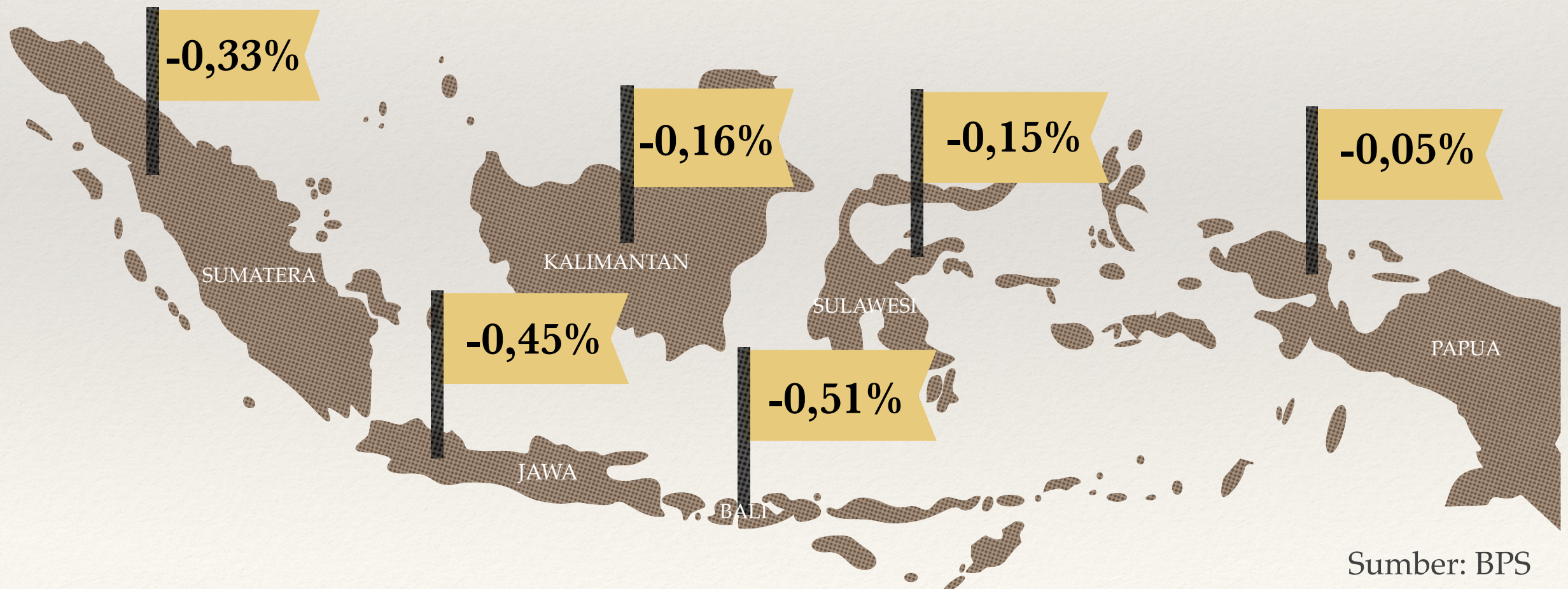
5 Indikator Utama Capaian

Semua indikator ini, secara langsung dan tidak langsung, terkait dengan kesejahteraan yaitu Kemiskinan, Ketimpangan, Pengangguran, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi.



Indikator I: Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami **penurunan**, dari 28,51 juta (11,22%) pada bulan Maret 2015 menjadi 28,01 juta (10,86%) pada bulan Maret 2016.

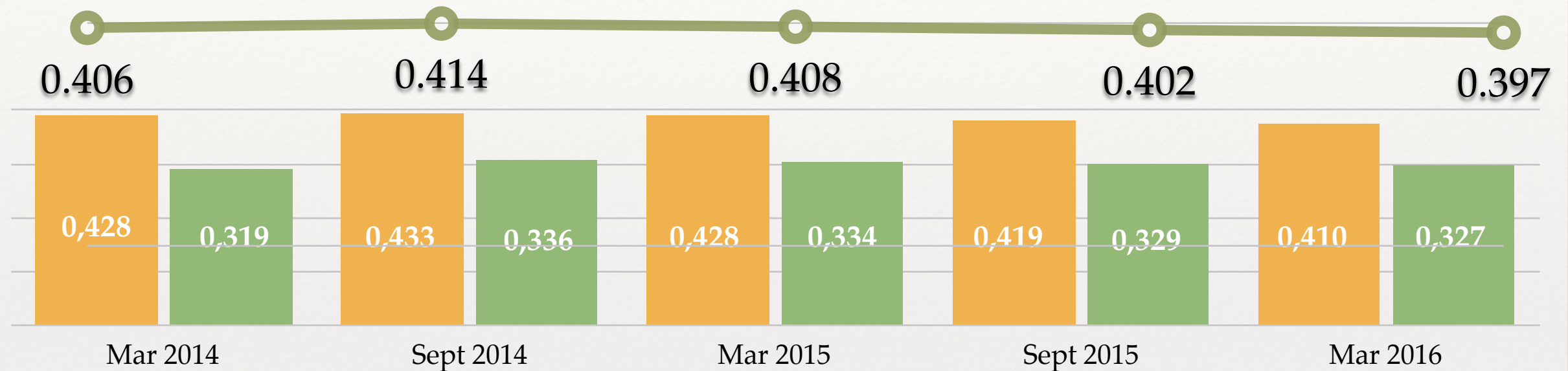


Sumber: BPS

Indikator II: Ketimpangan

Ketimpangan antara kaya dan miskin yang **diukur melalui Gini Ratio mengalami penurunan**, dari 0,408 pada bulan Maret 2015 menjadi 0,397 pada bulan Maret 2016.

INDEKS GINI RATIO



Ket: Nilai Gini Ratio terentang antara 0 - 1

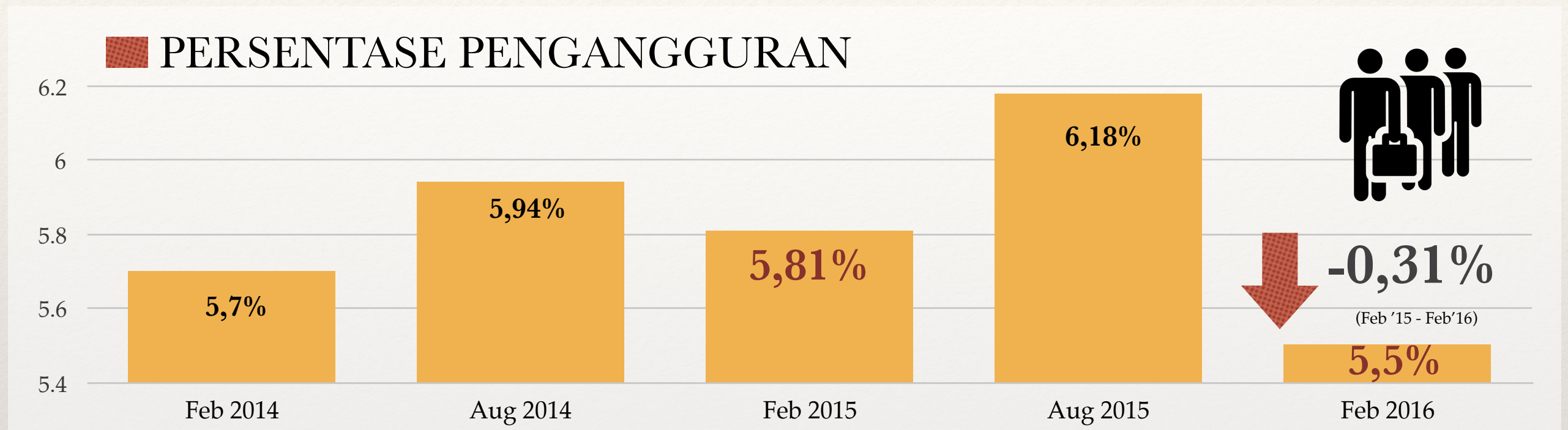
Semakin tinggi nilai Gini Ratio berarti semakin tinggi ketimpangan

Perkotaan
Pedesaan

Sumber: BPS diolah

Indikator III: Pengangguran

Angka pengangguran selama 2 tahun pemerintahan **mencapai titik terendah pada tahun 2016** menjadi 7,02 juta orang (5,50%) dari sebelumnya 7,45 juta orang (5,81%) pada tahun 2015.



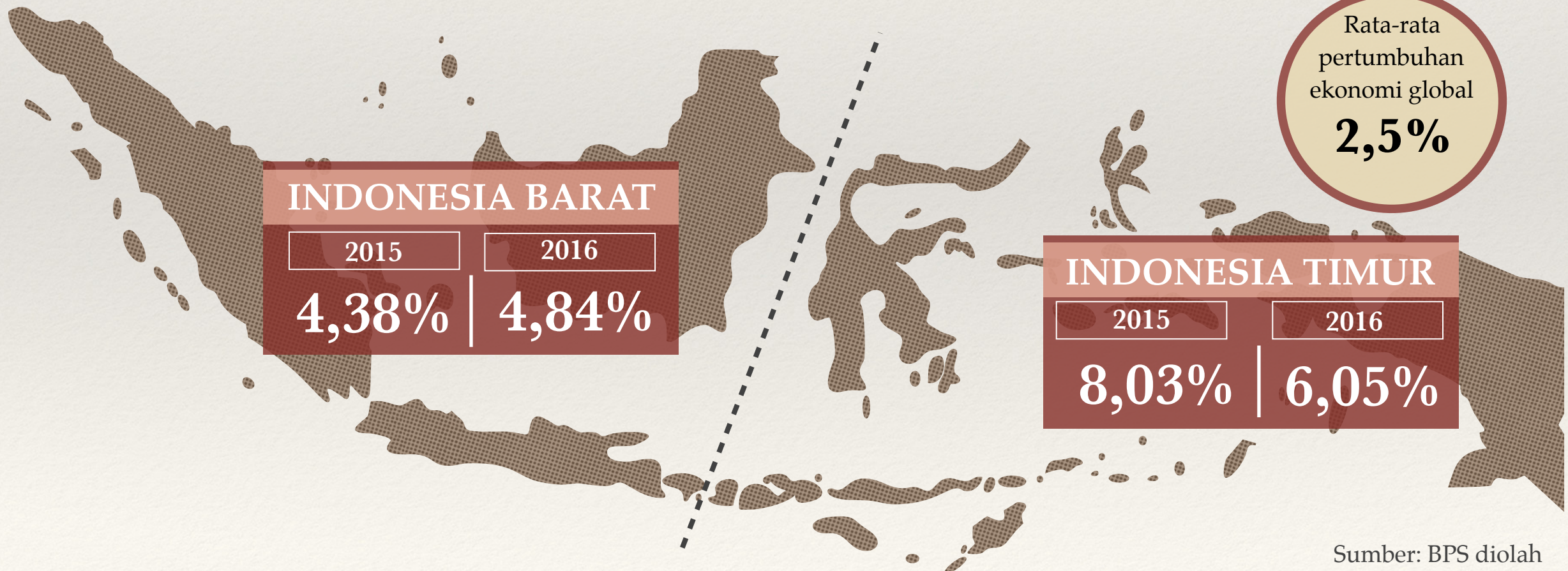
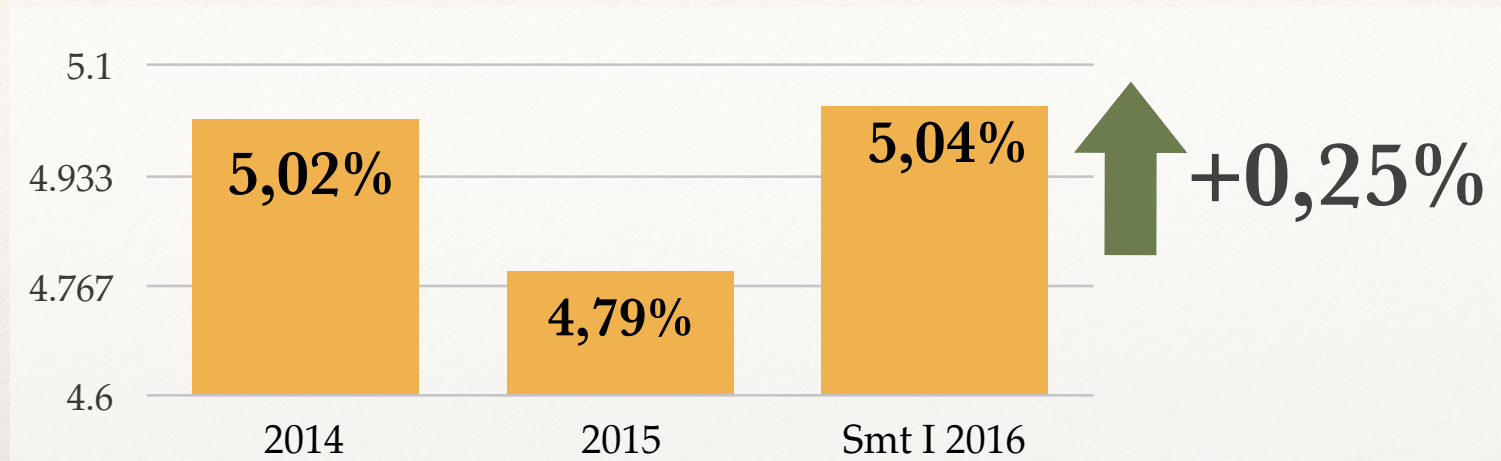
Sumber: BPS diolah



Indikator IV.A: Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah kelesuan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi pada Semester I 2016 meningkat menjadi 5,04% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yang sebesar 4,79%.

■ Di tengah perlambatan dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia masih tumbuh dan termasuk salah satu yang tinggi di Asia.

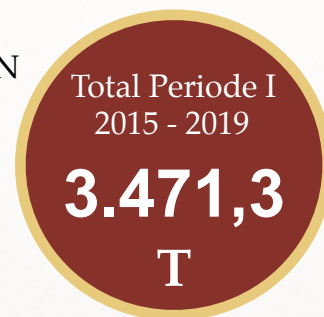
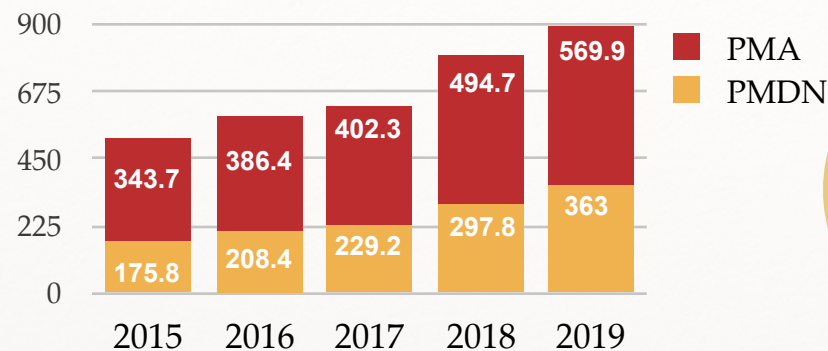


Sumber: BPS diolah

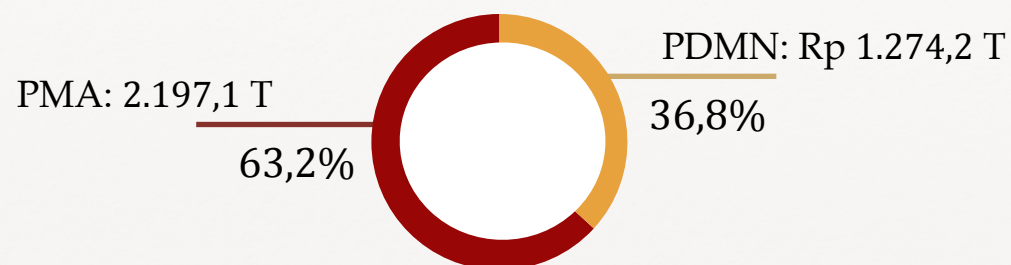
Indikator IV.B: Investasi Domestik dan Asing

Investasi memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama Semester I tahun 2016, capaian investasi tumbuh sebesar 14,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

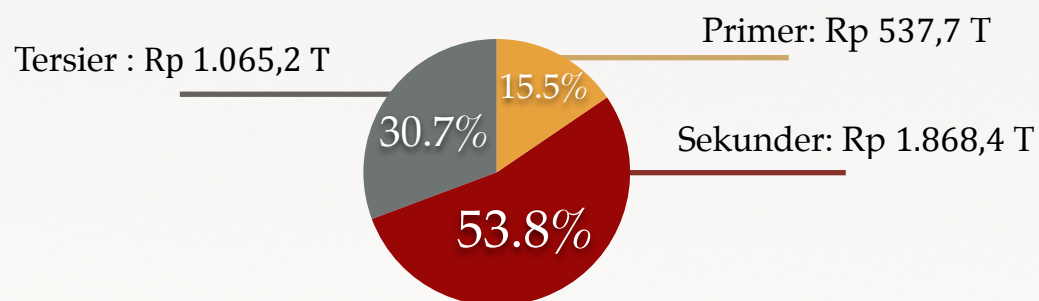
TARGET INVESTASI (2015-2019)



Berdasarkan Sumber Dana



Berdasarkan Sektor



Berdasarkan Lokasi



CAPAIAN INVESTASI 2015 - SEMESTER I 2016

Penyerapan Tenaga Kerja



2015: 375.982 orang

Jan-Juni 2016 : 354.739 orang

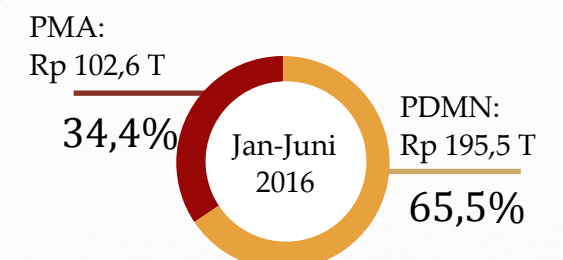
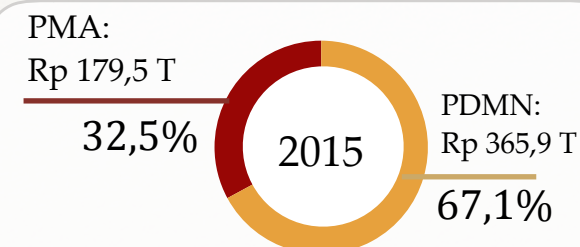
Capaian Investasi



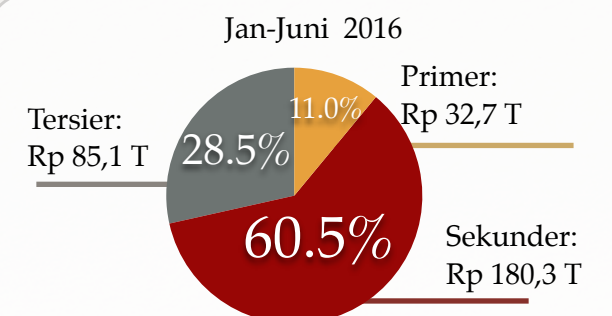
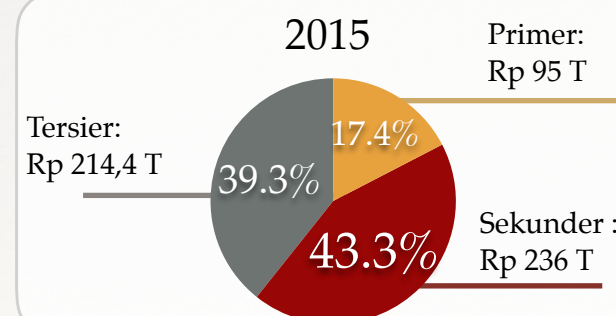
2015: Rp 545,4 T

Jan-Juni 2016 : Rp 298,1 T

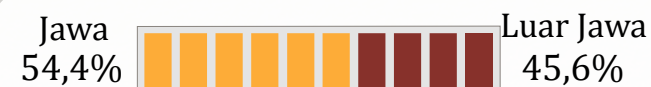
Berdasarkan Sumber Dana



Berdasarkan Sektor



Berdasarkan Lokasi

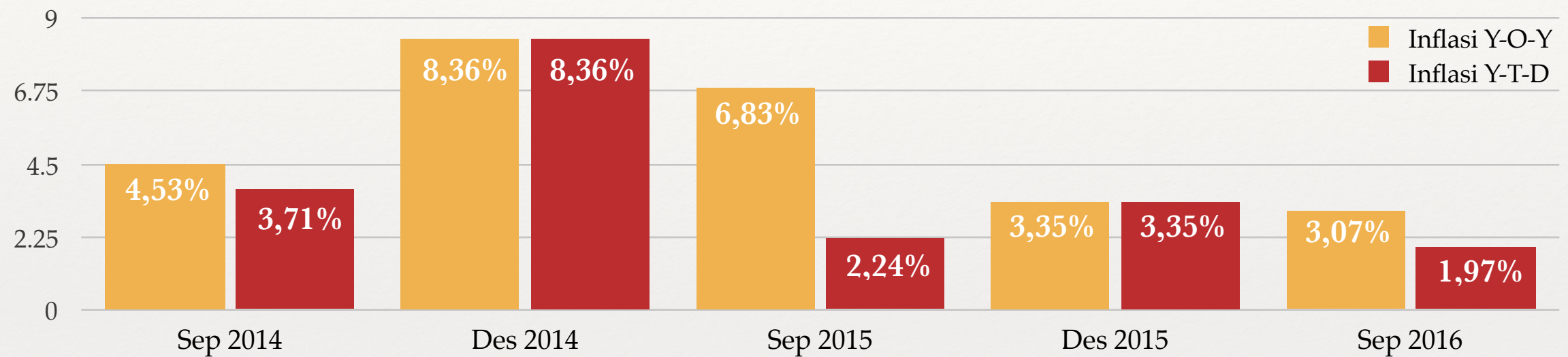


Sumber: BKPM

Indikator V: Inflasi

Inflasi sebagai cerminan daya beli masyarakat secara umum tetap rendah dan terkendali.

INDEKS HARGA KONSUMEN



Sumber: BPS diolah

Indikator lain: Utang Luar Negeri

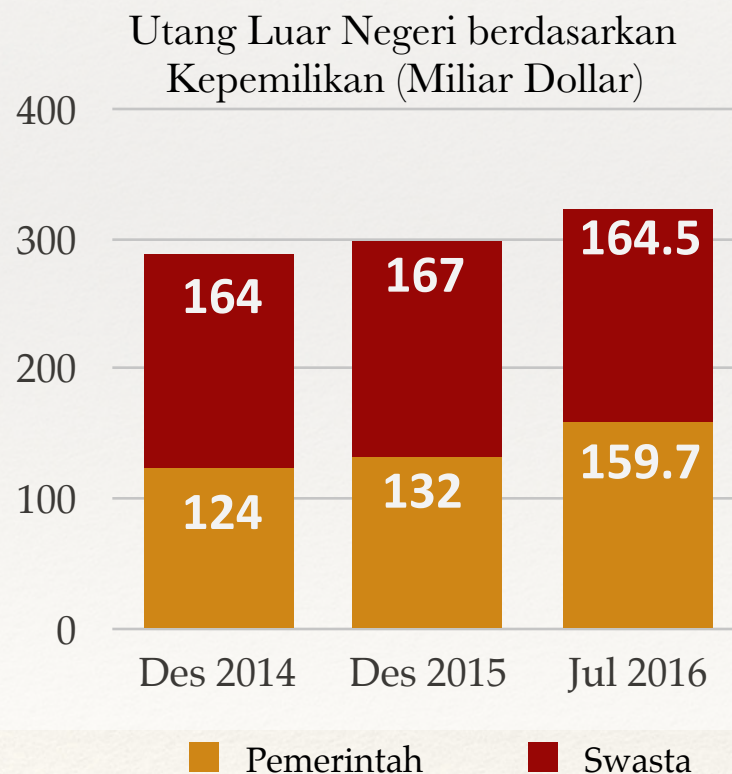
Utang Luar Negeri dimanfaatkan untuk membiayai sektor-sektor produktif dalam pembangunan. Sedangkan strategi pengelolaannya dilakukan dengan menggeser utang jangka pendek menjadi jangka panjang.

■ Pada akhir Juli 2016, utang luar negeri mencapai USD 324.2 billion atau naik 6.4% (yoy)

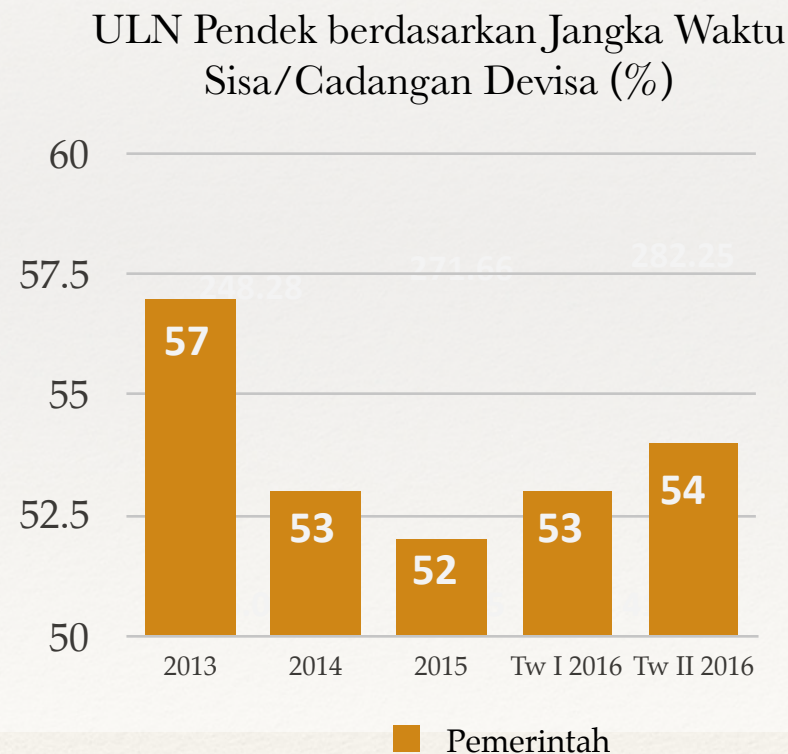
■ Berdasarkan jangka waktu asal, utang luar negeri jangka panjang mencapai USD 283,0 Miliar atau naik 8% (yoy), sementara utang luar negeri jangka pendek tercatat sebesar USD 41,2 Miliar atau turun 3.6% (yoy).

■ Berdasarkan kelompok peminjam, posisi ULN Indonesia masih didominasi ULN sektor swasta.

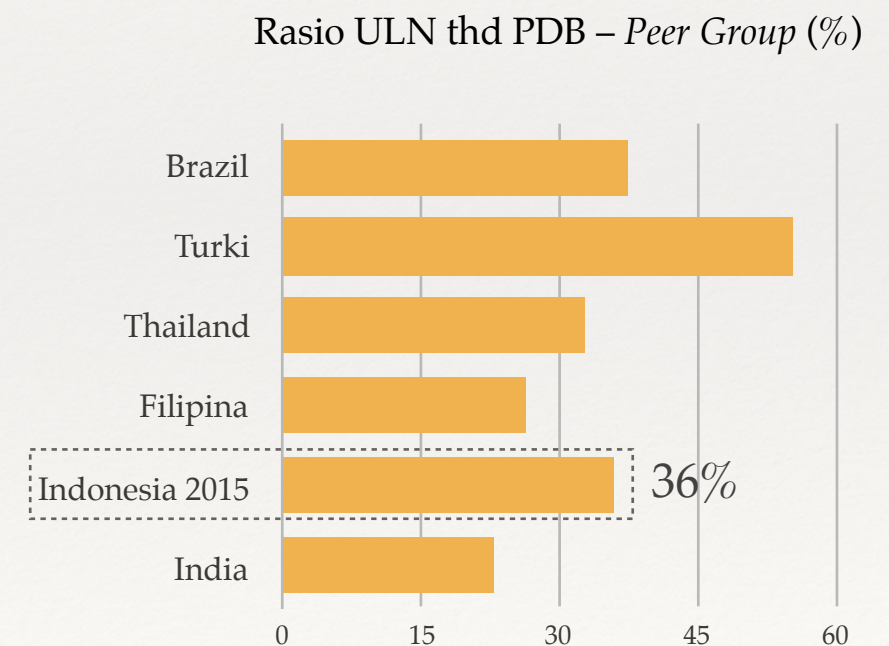
■ Beberapa indikator beban utang luar negeri, meskipun mengalami peningkatan, namun masih menunjukkan bahwa pengelolaan beban utang luar negeri Indonesia masih terkendali



Sumber : Bank Indonesia, SULNI



Sumber : Bank Indonesia, SULNI



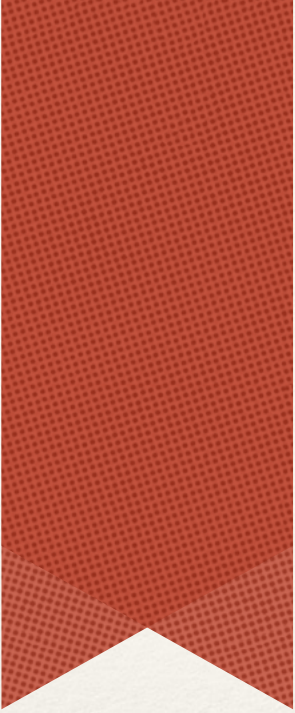
Sumber : Moody's Statistical Handbook 2016



II

TIGA FOKUS UTAMA

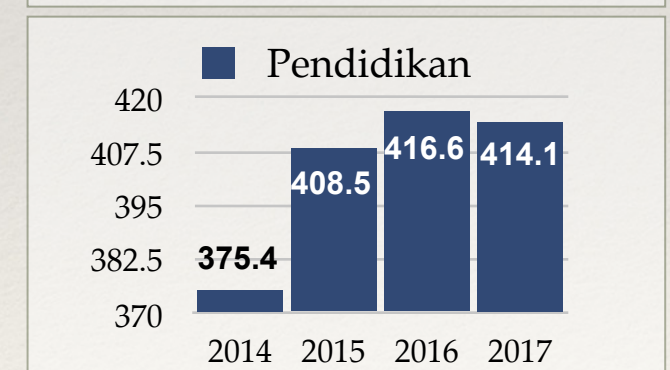
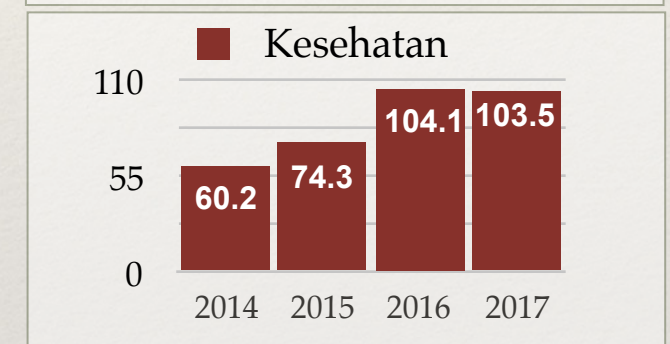
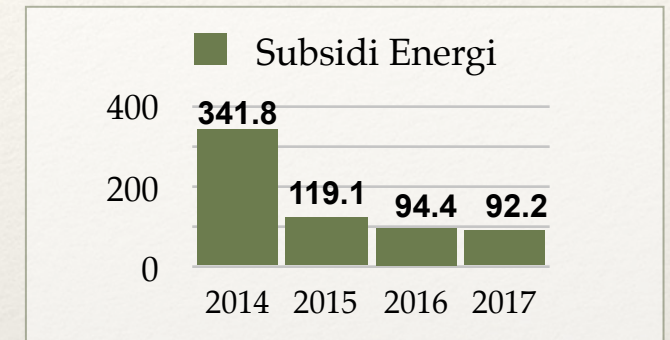
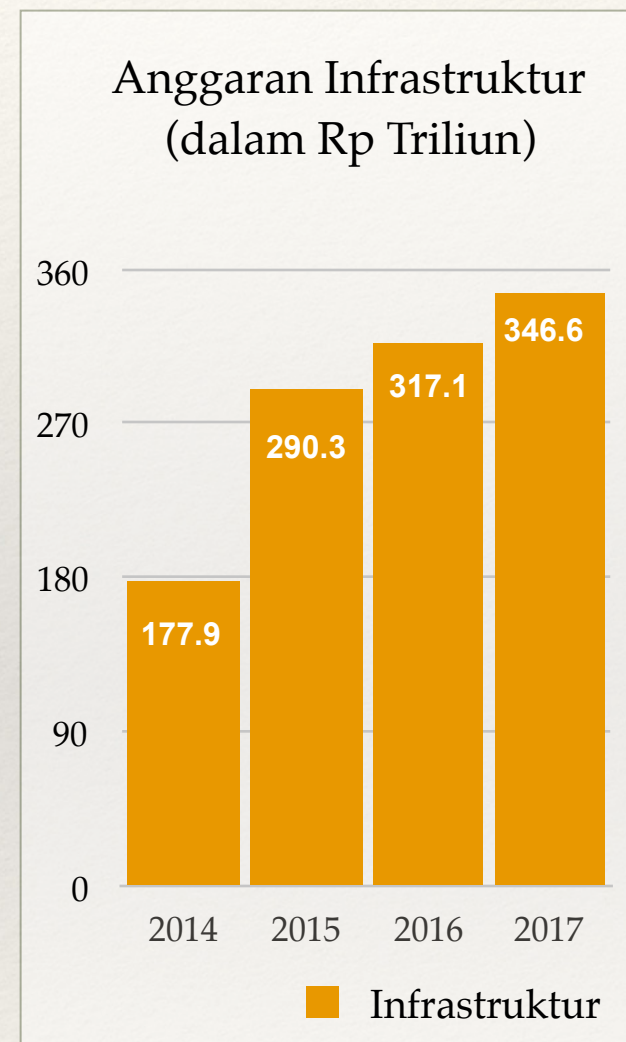
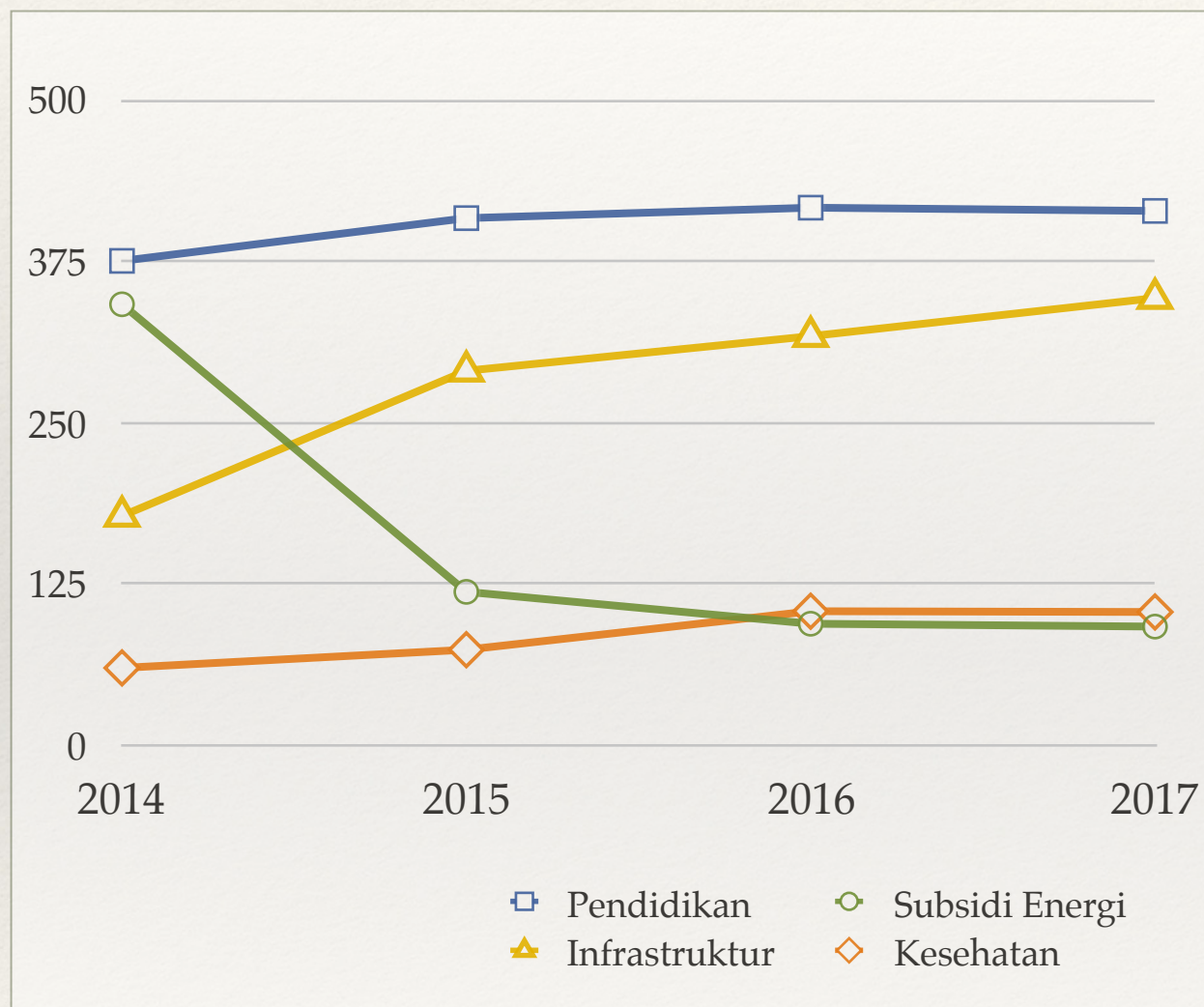
“ Terdapat 3 fokus di tahun kedua Pemerintahan Jokowi-JK. Pertama, *Infrastruktur* sebagai pengungkit utama produktivitas dan daya saing bangsa. Kedua, *Manusia* sebagai subjek pembangunan. Ketiga, *Kebijakan Deregulasi Ekonomi* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, di tengah-tengah kelesuan ekonomi global. ”



INFRASTRUKTUR

Peningkatan Anggaran dan Langkah Percepatan

Komitmen pembangunan infrastruktur tercermin dalam anggaran sebesar Rp 290,3 triliun pada tahun 2015 dan Rp 317,1 triliun pada tahun 2016, yang diikuti berbagai langkah percepatan.



Mempersatukan Indonesia dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur dilakukan secara komprehensif untuk menciptakan konektivitas nasional, sehingga dapat mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

PROYEK BERTEMA KONEKTIVITAS

1 DARAT

- Pengembangan sistem transportasi umum terintegrasi
- Peningkatan kapasitas jalan, pelebaran, dan tol
- Pembangunan monorail dan rel kereta api baru



2 LAUT

- Pembangunan *dryport*
- Revitalisasi pelabuhan laut
- Pembangunan jalur transportasi air



3 UDARA

- Pembangunan bandara utama khusus barang
- Pembangunan bandara utama untuk ekonomi



DAMPAK

1

Biaya transportasi dan logistik menjadi lebih murah

2

Pertukaran barang dan jasa menjadi lebih efisien

3

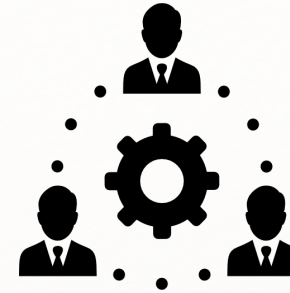
Produk-produk nasional lebih bersaing dengan asing

Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Ratusan proyek sedang dibangun untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, khususnya infrastruktur transportasi di darat, laut, dan udara.



Ketersediaan infrastruktur akan mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi antara Jawa dan luar Jawa



maka dirancang **101** proyek yang bertema konektivitas



Berbagai Langkah Percepatan

Butuh waktu yang tak sebentar untuk membangun infrastruktur, namun percepatan dapat dilakukan melalui Perbaikan kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, dan penyiapan proyek.



Menerbitkan PERPRES No 75 tahun 2014

tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas diterbitkan untuk membentuk KPPIP.



Menerbitkan PERPRES No 3 tahun 2016

tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang berisi 225 proyek infrastruktur dan 1 program ketenagalistrikan (35.000 MW)



Memberikan penugasan kepada BUMN dalam pembangunan Tol Trans Sumatera, LRT Sumatera Selatan, dan LRT Jabodebek



Mengembangkan Skema KPBU di proyek Palapa Ring, Kilang Minyak Bontang, dan Tol Serang-Panimbang



Membiayai sebagian seksi jalan tol

namun memberikan hak pengelolaan seluruh ruas jalan tol kepada kontraktor pembangun seksi lainnya dalam rangka meningkatkan nilai investasi kontraktor.

Proyek Strategis yang Dipercepat

Pada tahun 2016, sejumlah proyek strategis yang umumnya berlokasi di luar Jawa, telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan berkat langkah-langkah akselerasi.

Light Rail Transit (LRT)



Terminal Kalibaru



Pelabuhan Patimban



PLTU Batang



Jalan Tol Serang-Panimbang



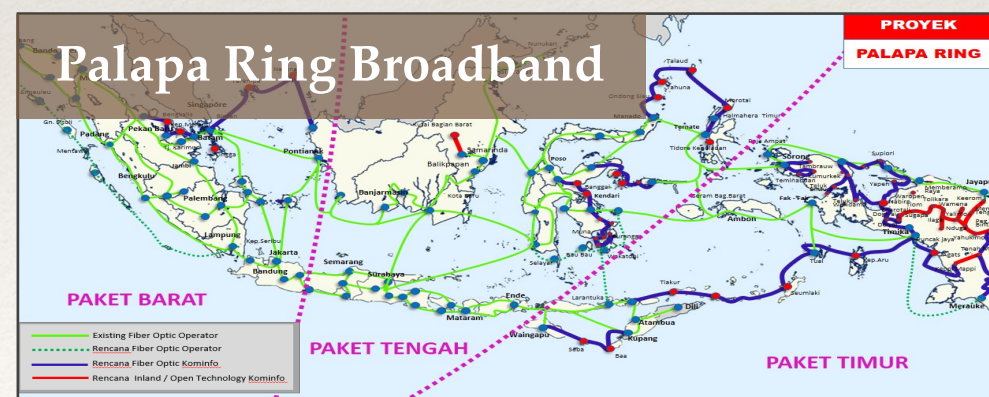
SPAM Umbulan



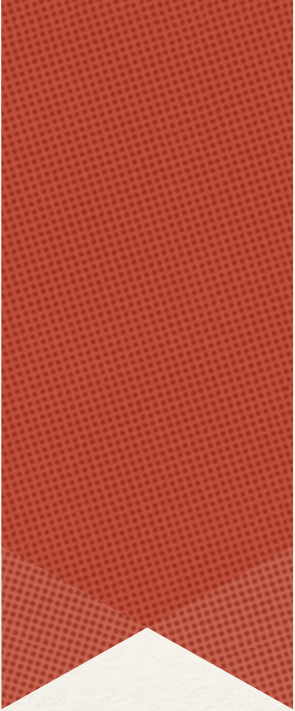
Revitalisasi Bandara



Palapa Ring Broadband



Sumber : KPPIP



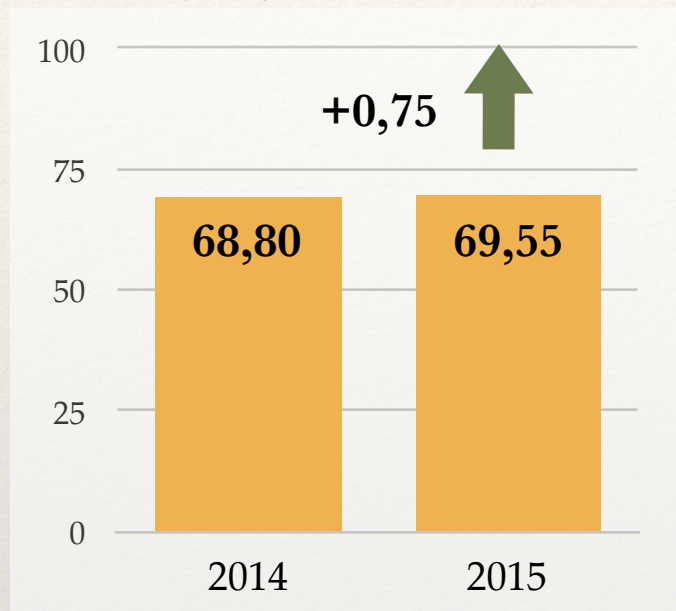
II

PEMBANGUNAN MANUSIA

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Kualitas pembangunan manusia yang diukur dari tiga hal, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak menunjukkan peningkatan selama masa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK.

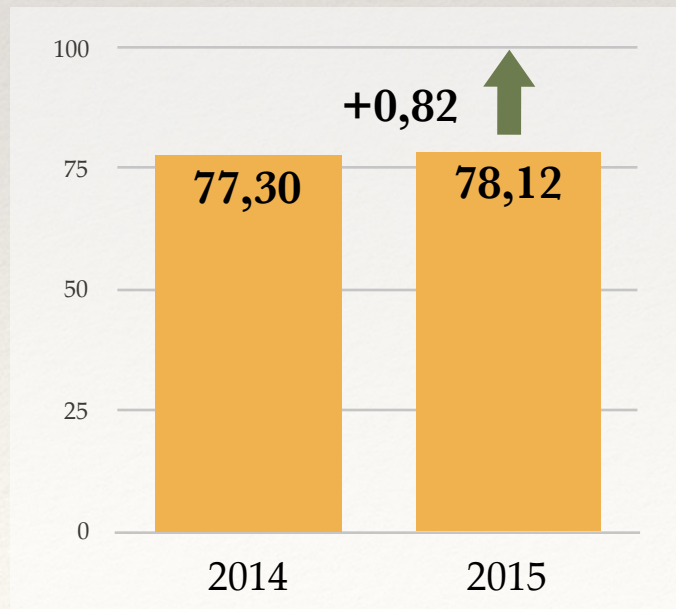
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(IPM) INDONESIA



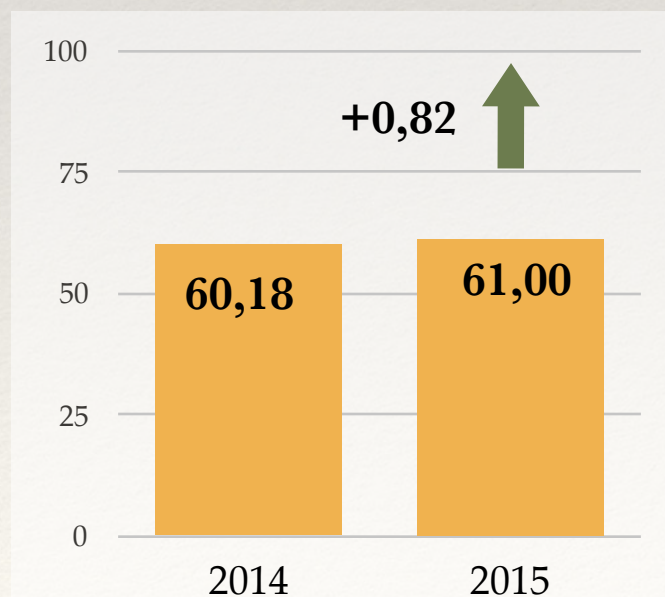
Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, ditunjukkan dengan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**, terus meningkat

Pertumbuhan IPM yang tinggi pada tahun 2015 didorong oleh pendidikan yang mencerdaskan, berbudaya, dan produktif serta peningkatan kesehatan keluarga Indonesia

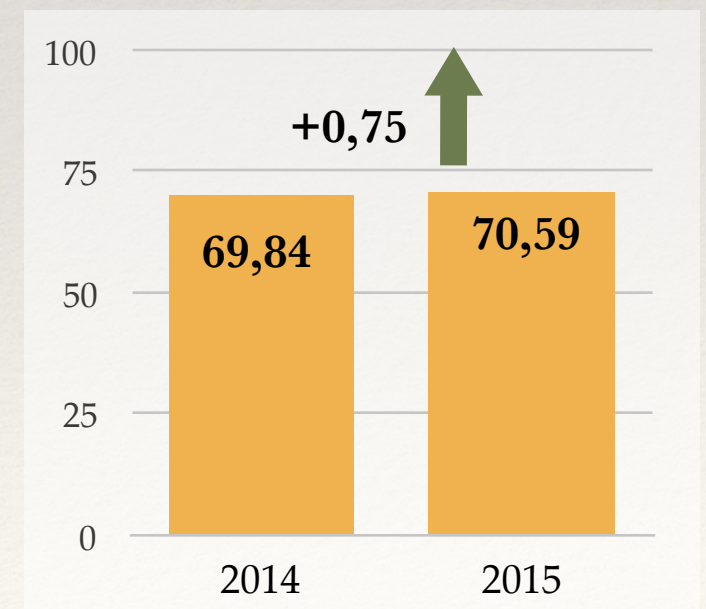
INDEKS KESEHATAN



INDEKS PENDIDIKAN



INDEKS HIDUP LAYAK



Sumber : BPS, 2016

Peningkatan Akses dan Infrastruktur Pendidikan

Upaya pengurangan kesenjangan pendidikan dilakukan antara lain dengan pemberian beasiswa, pembangunan/rehabilitasi sekolah, dan distribusi Kartu Indonesia Pintar.



Memperbaiki/meningkatkan kualitas ruang belajar melalui Rehabilitasi Sekolah

11.633
Ruang Belajar



Pendistribusian
Kartu Indonesia Pintar

17.927.308
anak



Membangun Unit Sekolah Baru pada wilayah-wilayah dengan angka partisipasi pendidikan yang rendah

726
Unit Sekolah Baru
(USB)
SD, SMP,
SMA/SMK, SLB



Membangun Ruang Kelas Baru untuk meningkatkan daya tampung sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK, SLB

14.223
Ruang Kelas
Baru

Sekolah Garis Depan dan Guru Garis Depan

Kesenjangan pendidikan di wilayah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal) diatasi dengan membangun 114 Sekolah Garis Depan dan mengirimkan 7.000 Guru Garis Depan.

- Sekolah Garis Depan (SGD) dan Guru Garis Depan (GGD) adalah perwujudan **Nawacita ke-3** dengan pembangunan **sekolah dan penyediaan guru di daerah 3T** (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal).
- Pada tahun 2016, sebanyak **114** SGD dan **7.000** GGD tersebar di 31 provinsi di Indonesia – peningkatan 10 kali lipat dari 797 GGD di tahun 2015.

PETA LOKASI SGD



114_{SGD}

menjadi contoh dan motor penggerak bagi sekolah di sekitarnya sehingga dapat merasakan pendidikan yang berkualitas meski berada di daerah 3T

Penguatan Kebudayaan dalam Pendidikan

Penguatan kebudayaan dilakukan melalui berbagai pendekatan yang inovatif, di antaranya dengan memperkenalkan program Seniman Masuk Sekolah dan Belajar Bersama Maestro.

Bantuan Fasilitas Sarana Kesenian Tradisional

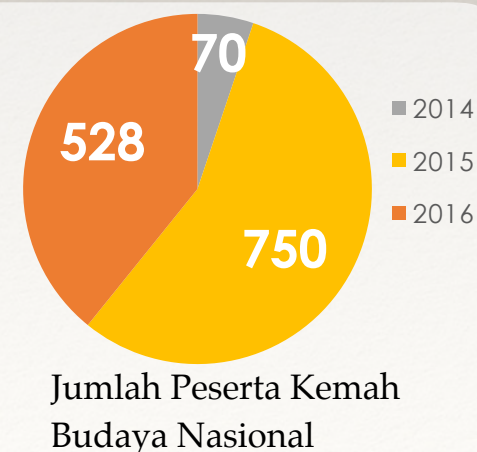
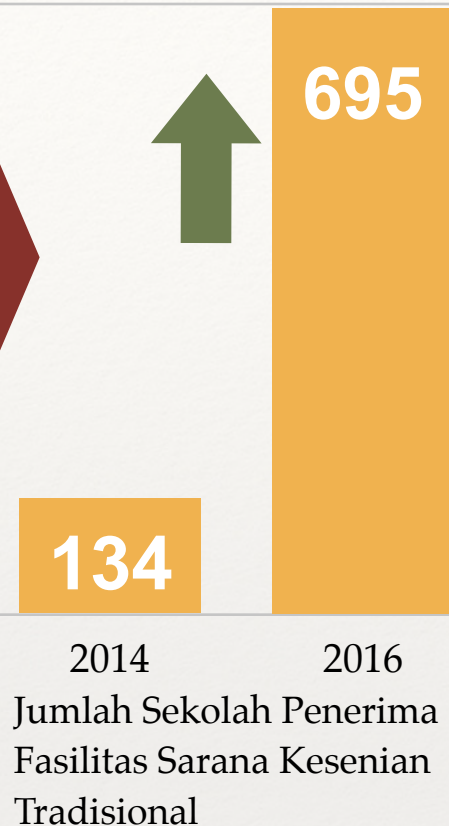
Bantuan pengadaan sarana kesenian tradisional (baik berupa alat musik, pakaian tari maupun pakaian adat) diberikan kepada sekolah-sekolah di tingkat SD / SMP / SMA / K

Laboratorium Seni & Film

Berupa bangunan fisik dan sarana pendukung laboratorium seni budaya dan film di tingkat SMA. Sebanyak 21 SMA mendapatkan bantuan selama 2015-2016.

Kemah Budaya Nasional

Wadah pertemuan Pramuka Penggalang tingkat nasional untuk menanamkan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai sejarah dan budaya bangsa, membina persaudaraan, mempererat persatuan dan kesatuan, serta jiwa kemandirian



Seniman Masuk Sekolah

Kegiatan pembelajaran seni di luar jam pelajaran oleh para seniman daerah.

1.440 siswa

Workshop Guru Sejarah

3.300
guru sejarah

Belajar Bersama Maestro

Media pembelajaran untuk siswa / siswi SMA / SMK mengenai makna budaya, nilai budaya, dan kearifan lokal serta memberi motivasi untuk berprestasi dalam bidang kesenian.

229 siswa
telah berkesempatan untuk belajar bersama maestro tanah air

Peningkatan Produktivitas Melalui Pendidikan Vokasi

Guna meningkatkan daya saing dan produktivitas rakyat, pemerintah membangun proyek pendidikan vokasi, mengevaluasinya, dan mencapai beberapa perkembangan signifikan.

Program 2016

Unit Sekolah Baru	Pengembangan SMK Kemaritiman
213 sekolah	40 sekolah
Ruang Kelas Baru	Pengembangan SMK Pariwisata
5.438 ruang	60 sekolah
Gedung Direhabilitasi	Pengembangan SMK Pertanian
999 ruang	32 sekolah
Bantuan Ruang Laboratorium/Praktik	Pengembangan SMK di Papua dan Daerah Garis Depan
1.333 ruang	42 sekolah
Pembangunan Perpustakaan	Bantuan Peralatan Praktik
363 ruang	934 sekolah

Capaian 2016

1. Tindak lanjut kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jerman
 - Pengiriman **30** orang guru SMK untuk *training* ke Jerman.
 - Mendatangkan **10** orang *Senior Expert* Jerman ke SMK
2. *Pilot project* pendidikan vokasi terintegrasi (SMK – Kursus – SMA-LB - industri) di Batam, Solo, Malang, Mataram, Makassar, Sidoarjo, Tuban, Semarang, Jayapura, Metro, dan Cikarang Barat
3. Program Keahlian Ganda (Guru Adaptif menjadi Guru Produktif) terhadap **15.000** guru

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Mewujudkan Keluarga Indonesia Sehat

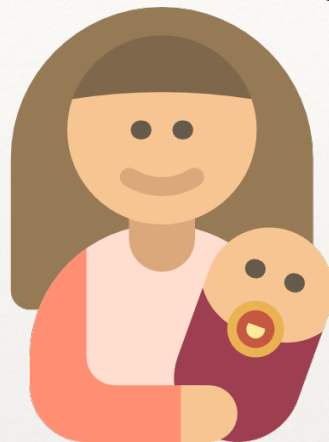
Sejumlah indikator penting seperti Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Balita yang mengalami Stunting menurun – yang terakhir ini, cukup signifikan.

Penyehatan keluarga Indonesia dicapai melalui tiga pilar utama:

1. Mengubah cara pandang tentang kesehatan/paradigma sehat;
2. Peningkatan pelayanan kesehatan;
3. Membangun Jaminan Kesehatan Nasional.

Angka Absolut Kematian Ibu

5.019 orang



2013

4.809 orang



2015

Angka Absolut Kematian Bayi

23.703 anak



2013

22.267 anak



2015

Angka Balita Yang Mengalami Stunting Menurun



2013 **37,2%**

2015 **29,6%**

Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil

Hingga akhir 2016 akan dibagikan sebesar **4.952,2** ton makanan tambahan untuk **550.248** ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis



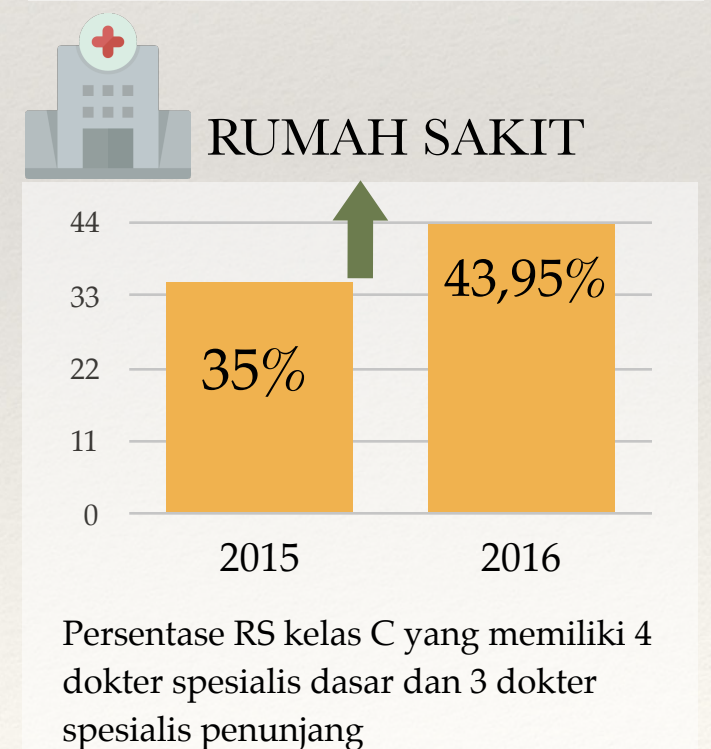
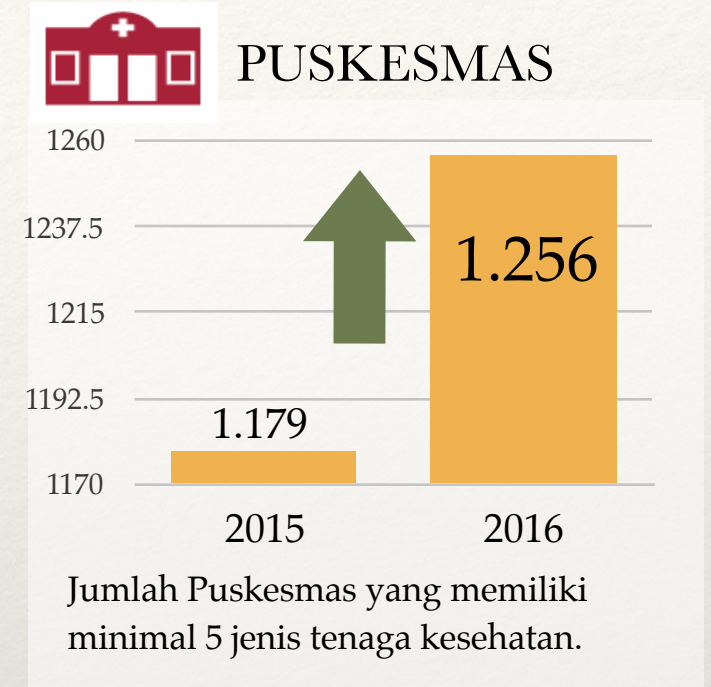
Program Nusantara Sehat

Untuk memberikan layanan berkualitas pada masyarakat di wilayah terpencil dan perbatasan, ditempatkan 838 tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lain di 158 Puskesmas.



- Pemerintah terus meningkatkan jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit dengan tenaga kesehatan yang memadai
- Pemerintah juga mengirimkan Tim Nusantara Sehat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas di daerah terpencil dan perbatasan

Sumber : Kementerian Kesehatan



Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional

Pada tahun 2016, Pemerintah terus meningkatkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan fasilitas kesehatan yang melayani serta membayarkan iuran bagi penduduk termiskin.



168.807.302

Penduduk Indonesia telah
menjadi peserta Jaminan
Kesehatan Nasional
(per 9/9/2016)

25.654

fasilitas kesehatan
melayani pasien JKN



20.663 FKTP



2.028 FKTL



2.009 Apotik



953 optik

Pada tahun 2016, Pemerintah telah membayarkan

Rp 20T sebagai iuran jaminan kesehatan
untuk **40%** penduduk dengan kondisi sosial
ekonomi terendah di Indonesia

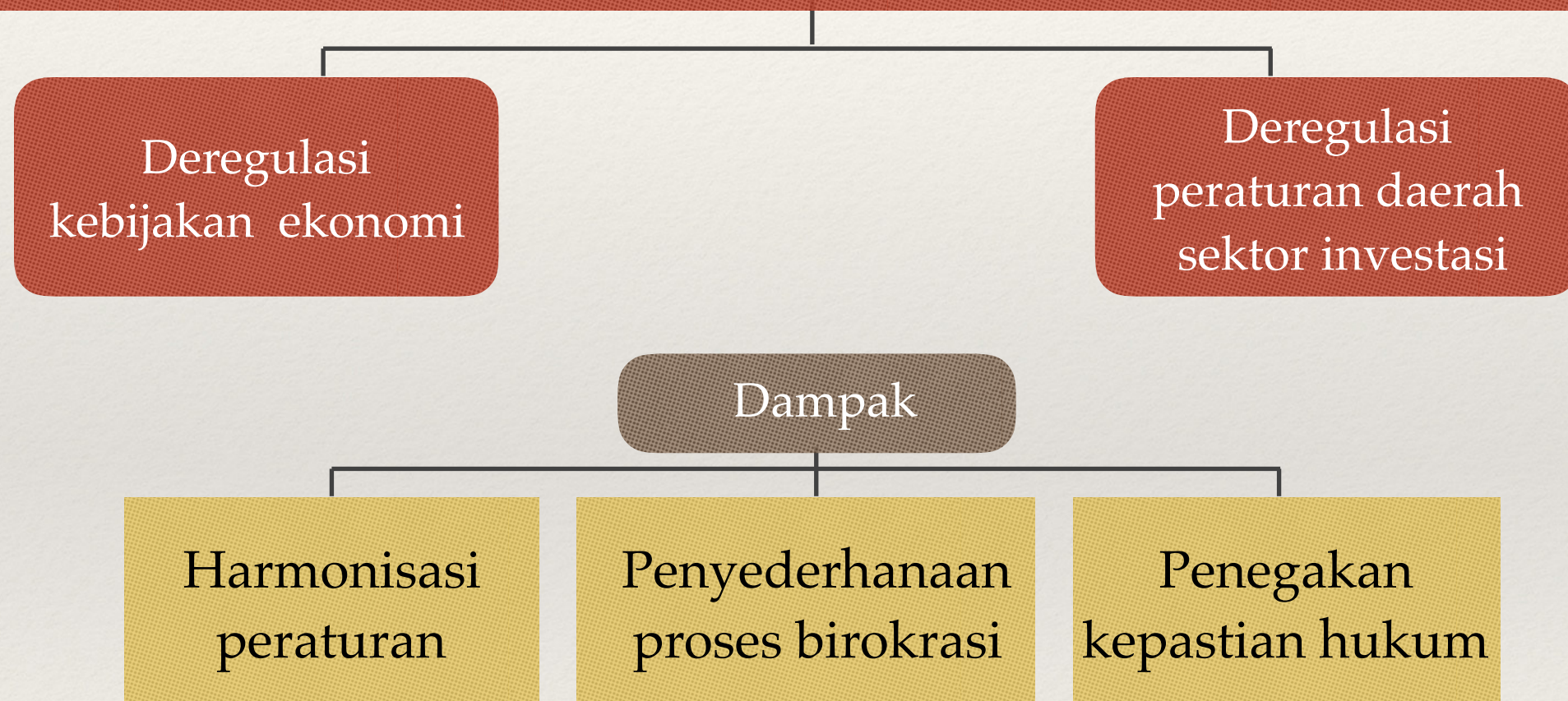
III

KEBIJAKAN
DEREGULASI EKONOMI

Deregulasi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi

Selain penegakan dan jaminan kepastian hukum, sasaran deregulasi adalah penyederhanaan proses birokrasi yang dapat berdampak positif pada daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

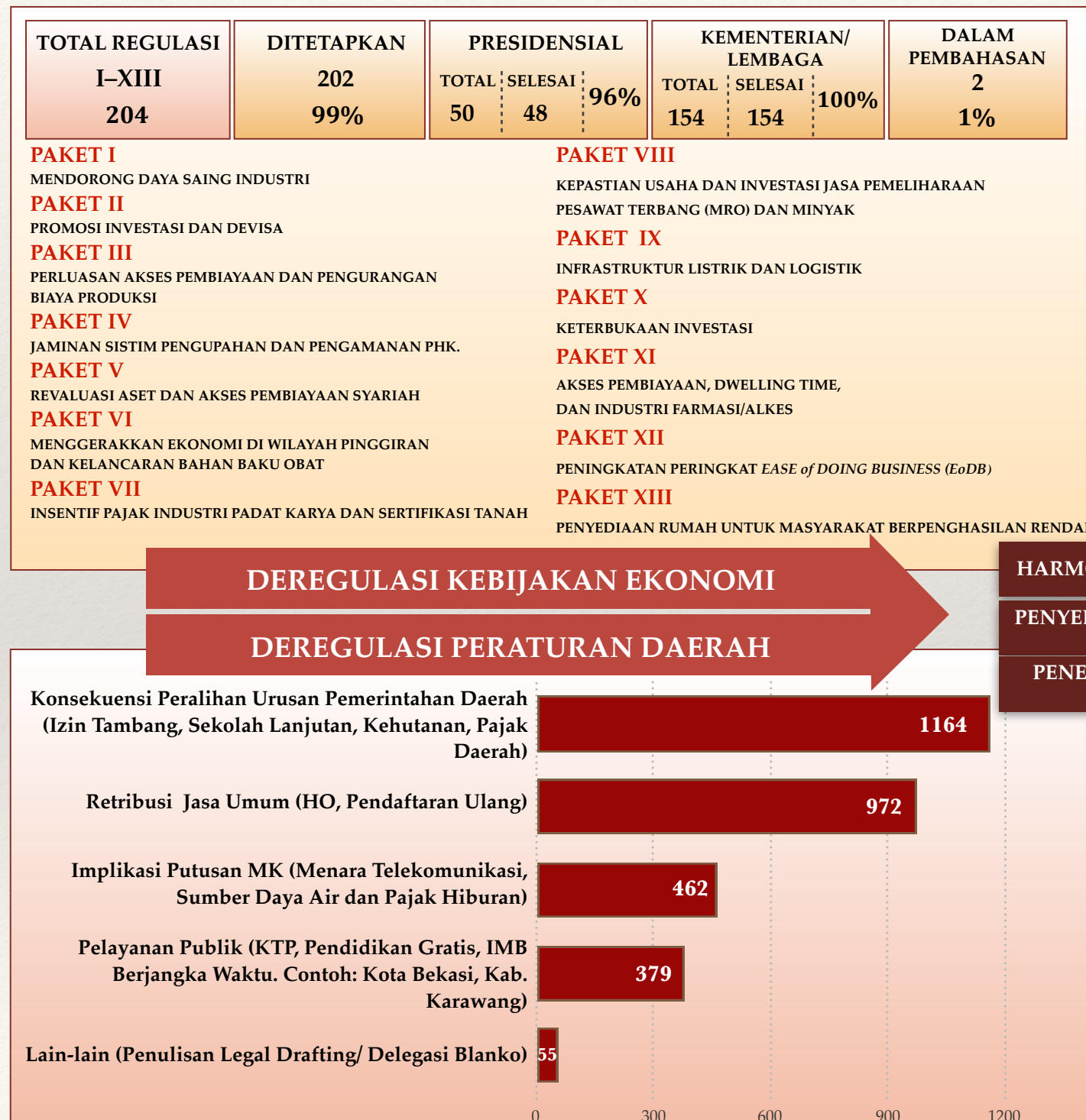
Untuk merespons perlambatan ekonomi pada tahun 2015 yang melemahkan daya saing industri dan daya beli masyarakat, pemerintah melakukan rasionalisasi kebijakan ekonomi dalam bentuk deregulasi yang terdiri atas:



Pada akhirnya, program deregulasi bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri, daya beli masyarakat, investasi, ekspor, wisata, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Deregulasi Kebijakan Ekonomi dan Peraturan Daerah

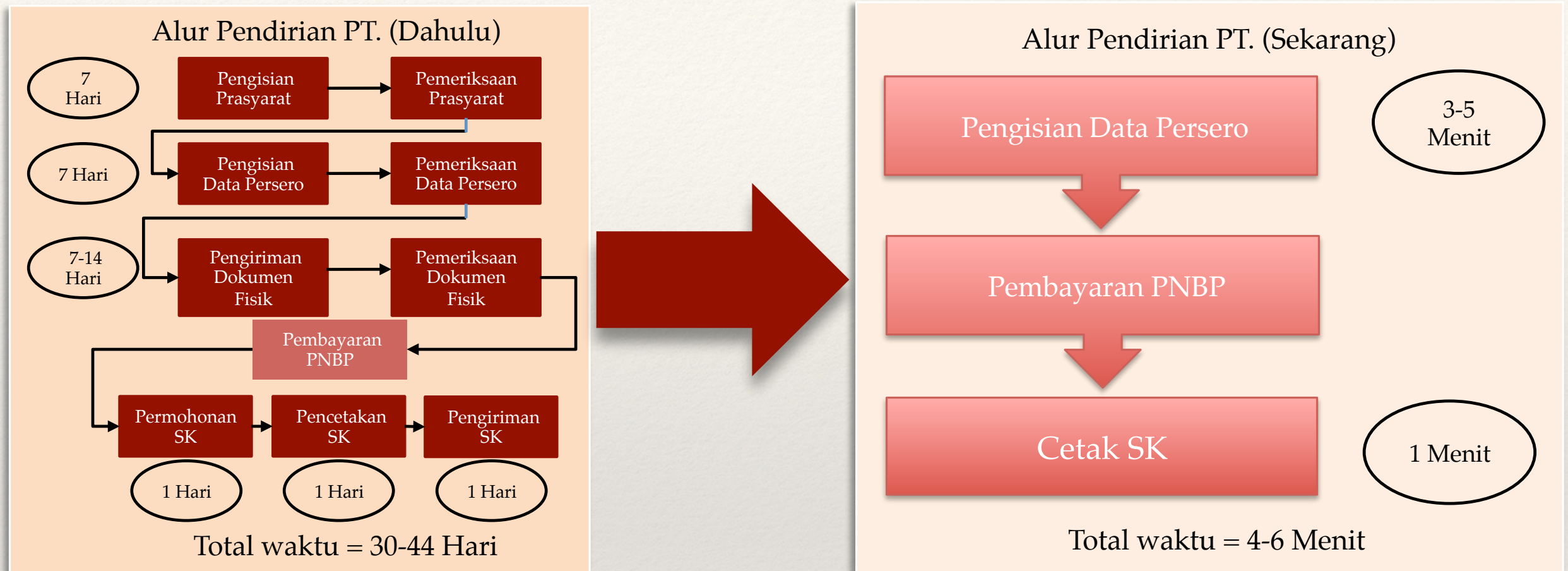
Disusun 13 paket kebijakan ekonomi dan pemangkasan ribuan peraturan daerah selama dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK.



Meningkatkan daya saing industri, daya beli masyarakat, investasi, ekspor, wisata, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Perkembangan Penyederhanaan Perizinan

Proses penyederhanaan perizinan yang selama ini menjadi tantangan utama dalam peningkatan daya saing terus diperbaiki dan menunjukkan kemajuan yang signifikan.



PROGRESS IMPLEMENTASI REFORMASI KEMUDAHAN BERUSAHA

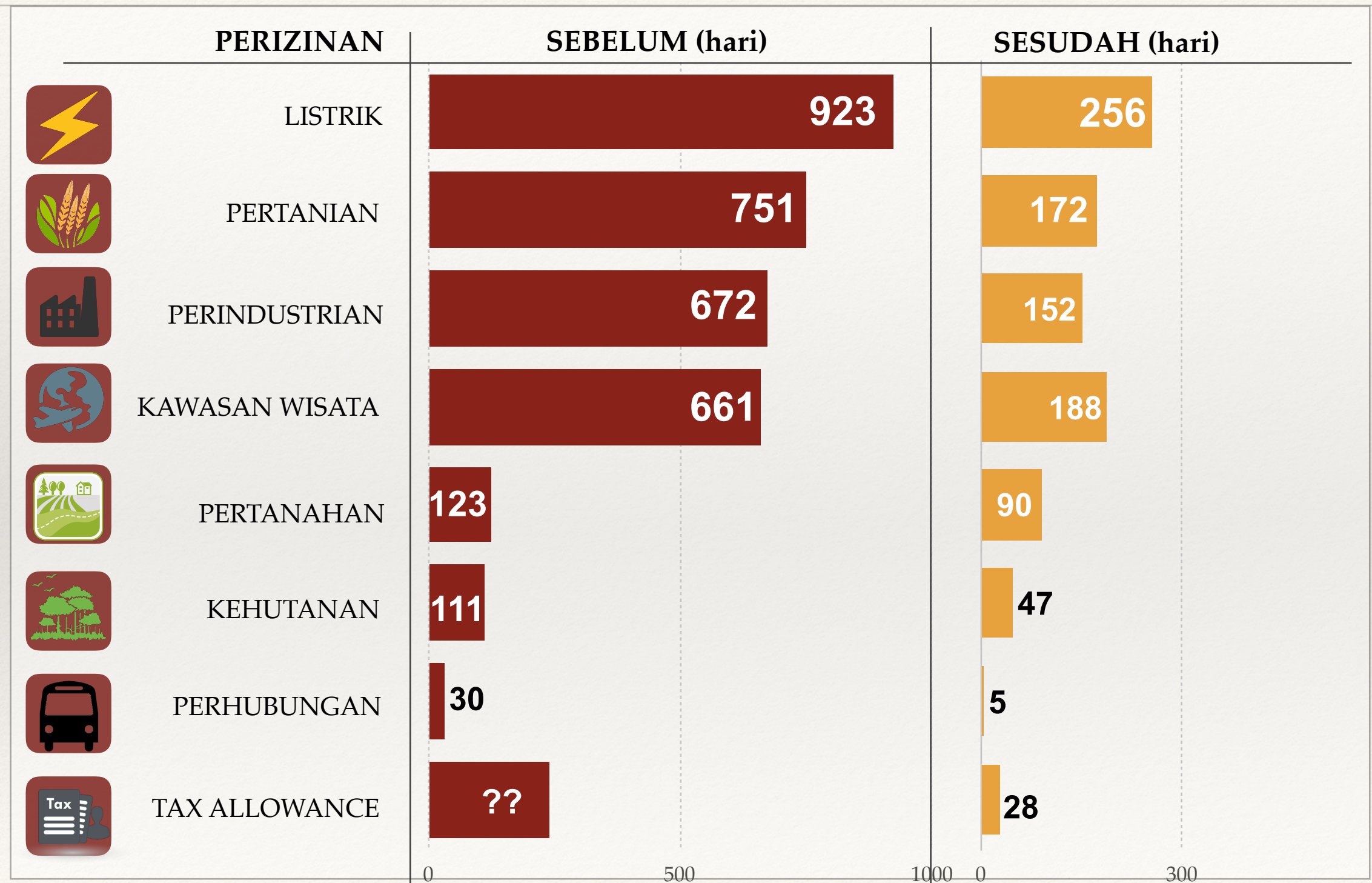
A. MEMULAI USAHA (STARTING BUSINESS)
Membuat dasar hukum terkait dengan tidak lagi mempersyaratkan modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000

B. AKSES PERKREDITAN (GETTING CREDIT)
Membuka akses pendaftaran Fidusia kepada pemohon masyarakat, lembaga pembiayaan, dan perbankan

C. PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN (RESOLVING INSOLVENCY)
Pembahasan Merevisi Pasal 3 dan Pasal 4 Permenkumham Nomor 1 tahun 2013

Dampak Yang Sudah Terjadi

Proses perizinan yang sebelumnya berlangsung puluhan atau ratusan hari, telah dipangkas secara sangat signifikan dan berdampak pada meningkatnya daya saing nasional.





IV

TOPIK KHUSUS



Selain berfokus pada Infrastruktur, Manusia, dan Kebijakan Deregulasi Ekonomi, terdapat sejumlah topik yang menonjol pada tahun kedua pemerintahan. Topik-topik khusus ini memberikan ilustrasi tentang akselerasi yang sedang terjadi dalam berbagai dimensi.





DIPLOMASI INTERNASIONAL

Menciptakan Perdamaian Dunia

Salah satu langkah penting dalam diplomasi internasional adalah penyelenggaraan KTT Luar Biasa ke-5 OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.



Indonesia Menjadi Tuan Rumah KTT Luar Biasa ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif

Resolusi: Menegaskan kembali posisi negara anggota OKI terhadap permasalahan Palestina dan Al-Quds Al-Sharif



ASEAN-US Summit 2016 Februari 2016:

Presiden Jokowi Memimpin Sidang di sesi pembahasan mengenai terorisme dengan menyerukan pentingnya moderasi, perdamaian dan toleransi



Peringkat 11 negara kontributor Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (2.867 personil) dengan visi 4.000 personil pada 2019

Tahun 2012 - Juli 2016, Indonesia mengirimkan 73 personil Tim Pengamat Indonesia (TPI) untuk International Monitoring Team di Filipina Selatan



Memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional untuk membangun saling pengertian antar peradaban, memajukan demokrasi dan peradaban dunia, meningkatkan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan.

- Presiden Joko Widodo -

Melindungi WNI dan Menegakkan Kedaulatan NKRI

Perlindungan WNI terus ditingkatkan melalui pendataan dalam database e-perlindungan, sedangkan kedaulatan ditegakkan melalui berbagai upaya perundingan perbatasan.



-  Melindungi WNI yang berada di luar negeri, Hingga Juli 2016, terdapat **2.769.484** WNI yang telah terdaftar dalam database e-perlindungan
-  Menyelesaikan: **Jan – Jul 2016**
7492/10.904 kasus perlindungan
191/257 kasus perdagangan manusia
-  **37 WNI** bebas dari ancaman hukuman mati
-  **(2015-2016)** Membebaskan **16 WNI** yang disandera



-  Menerapkan strategi perlindungan WNI di luar negeri melalui pencegahan, deteksi dini, dan perlindungan secara cepat dan tepat
-  Strategi ini didukung dengan Community Engagement penguatan database e-perlindungan dan payung hukum, serta koordinasi dan edukasi masyarakat
-  Menerapkan Sistem Informasi manajemen Keimigrasian (SIMKIM)

-  Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan **10 negara** yaitu Papua Nugini, Malaysia, Timor Leste, India, Vietnam, Palau, Filipina, Thailand, Australia Singapura.
-  Indonesia memiliki perbatasan darat dengan **3 negara** yaitu Papua Nugini, Malaysia, dan Timor Leste .
-  Indonesia memiliki **18 Perjanjian Batas Maritim** dan **27 Perjanjian Batas Darat** dengan Negara Tetangga
-  Agustus 2015-Juli 2016 : Indonesia telah melaksanakan 6 Perundingan batas maritim dan 13 Perundingan penegasan batas darat
-  Menunjuk utusan khusus penetapan batas maritim RI-Malaysia untuk mempercepat proses negosiasi perbatasan kedua negara
-  Menegaskan Kepulauan Natuna sebagai bagian dari Indonesia



Kepemimpinan Regional dan Global

Sebagai perwujudan dari politik luar negeri yang bebas-aktif, pemerintah secara aktif mengambil peran kepemimpinan di tingkat regional dan global.



Presiden/Panglima Tertinggi TNI berada di KRI Imam Bonjol 383 sebagai Wujud Komitmen Kehadiran Negara Menjaga Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia (23 Juni 2016)



G-7 Outreach Meeting:

Indonesia untuk pertama kalinya diundang dalam G7 Outreach Meeting, tema yang dibahas yaitu stabilitas dan kesejahteraan di Asia serta pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, dan Presiden RI diminta menjadi pembicara utama pada sesi Stabilitas dan Kesejahteraan di Asia



Kerja sama Selatan – Selatan dan Triangular

Meningkatkan kerja sama Selatan – Selatan dan Triangular sebagai bagian dari perjuangan membangun kerja sama internasional dan tantangan dunia yang lebih adil, sejajar dan saling menguntungkan

Indonesia memberikan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas kepada 600 peserta dari 76 Negara Pasifik dan Afrika, khusus Palestina, Indonesia telah melaksanakan 154 program untuk 1.774 peserta



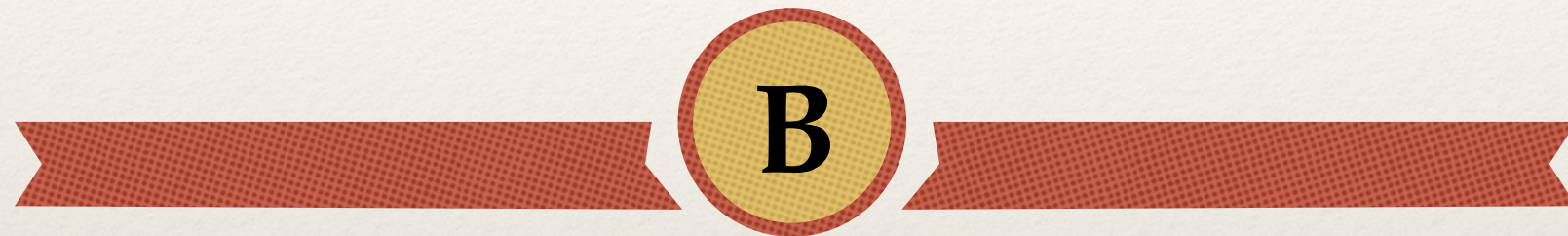
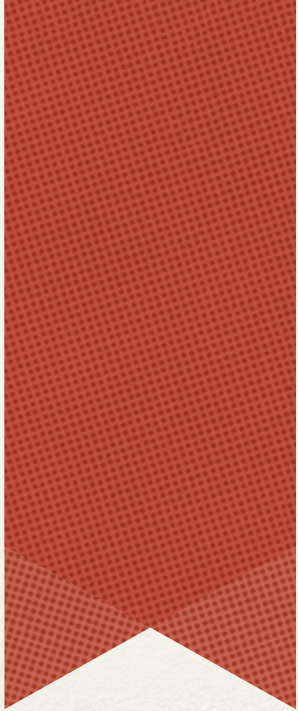
G-20 Summit:

Mendorong negara-negara G20 untuk menyinergikan kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural guna perbaikan ekonomi dunia



KETT ASEAN:

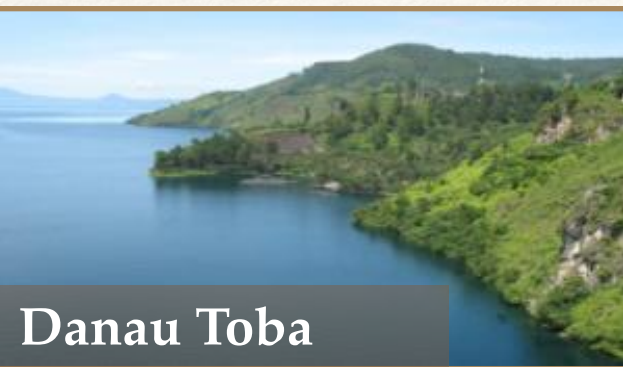
Menekankan pentingnya sentralitas ASEAN untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Mendorong kerjasama maritim, pemberdayaan UMKM, infrastruktur dan konektivitas serta pemberantasan kejahatan lintas-batas. Mengajak untuk mendukung kemerdekaan Palestina



PARIWISATA

Menciptakan “10 Destinasi Unggulan Baru”

Pendekatan Indonesia-Sentris sangat tepat untuk diterapkan dalam konteks pembangunan pariwisata, karena keindahan alami berbagai destinasi unggulan di seluruh Nusantara.



Danau Toba



Tanjung Kelayang



Tanjung Lesung



Kepulauan Seribu



Borobudur



Bromo Tengger Semeru



Labuan Bajo



Wakatobi



Morotai



Mandalika

Sumber : Kementerian Pariwisata

Kinerja Pariwisata Nasional

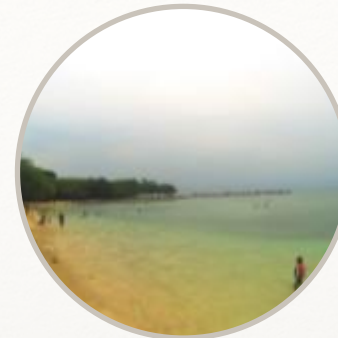
Upaya peningkatan kinerja pariwisata nasional terus dilakukan dengan cara pembenahan regulasi serta pengembangan destinasi unggulan, khususnya di luar Pulau Jawa.

Tanjung Kelayang



1. Pembangunan *Mobile Power Plant* (pembangkit bergerak) 25 MW
2. Pembangunan PLTD berbahan *Crude Palm Oil* (CPO) kapasitas 5 MW
3. Peningkatan status bandara menjadi Bandara Internasional
4. Peningkatan kualitas air bersih

Tanjung Lesung



1. Pembebasan lahan trase jalan tol
2. Lelang dan penetapan kontraktor
3. FGD Kampung Cikadu, Desa Tanjung Jaya, untuk program pemukiman pendukung di kawasan KEK Tanjung Lesung
4. Pengelolaan SDA, Peningkatan kapasitas jalan, Pengembangan infrastruktur wilayah.

Mandalika



1. Percepatan pembangunan hotel
2. *Ground breaking* pembangunan masjid
3. Penggalakan program CSR
4. PMN untuk ITDC sebesar 700 M pada tahun 2017
5. Pembangunan tahap pertama instalasi pengolah air bersih dengan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)
6. Penyiapan masterplan pembangunan PLTS di lahan 60 ha

Wakatobi



1. Peresmian bandara Matahora Wakatobi oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata, 8 April 2016
2. Pembukaan jalur pelayaran Wakatobi-Baubau-Kolaka PP oleh PT Pelni menggunakan Jetiner kapasitas 600 pax, frekuensi 2x seminggu (Selasa dan Kamis) mulai 31 Mei 2016
3. Surat Bupati terkait potensi lahan untuk Badan Otorita Pariwisata Wakatobi, 17 Juni 2016

Morotai



1. Peningkatan utilisasi pelabuhan udara dengan penerbangan reguler
2. Pembangunan hotel / homestay / resort

Menjangkau Pasar yang Lebih Luas

Upaya pemasaran destinasi pariwisata nasional dilakukan dengan cara menggelar berbagai kegiatan budaya maupun olahraga di tingkat nasional serta promosi gencar ke luar negeri.



Kegiatan ITB Berlin yang diikuti Asdep Pengembangan Pasar ETAA



ATM Dubai yang diikuti Asdep Pengembangan Pasar ETAA



Bus Wonderful Indonesia di Paris



Banyuwangi Tour de Ijen



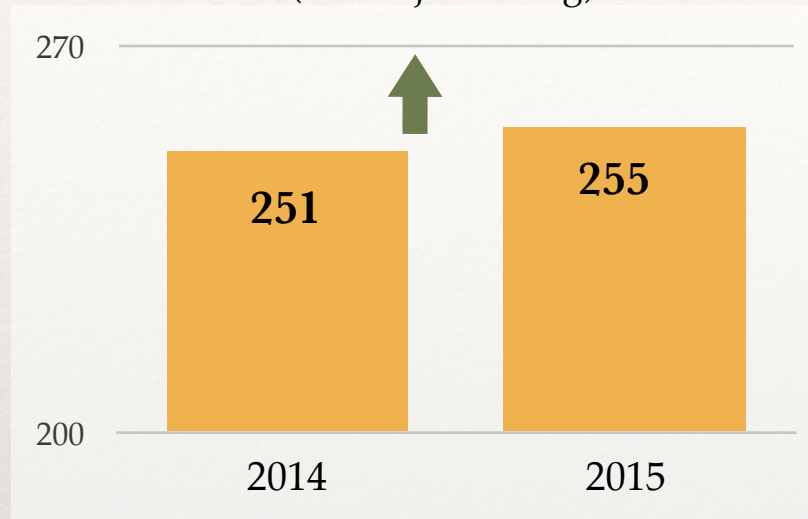
Festival Biak Wampasi

Sumber : Kementerian Pariwisata

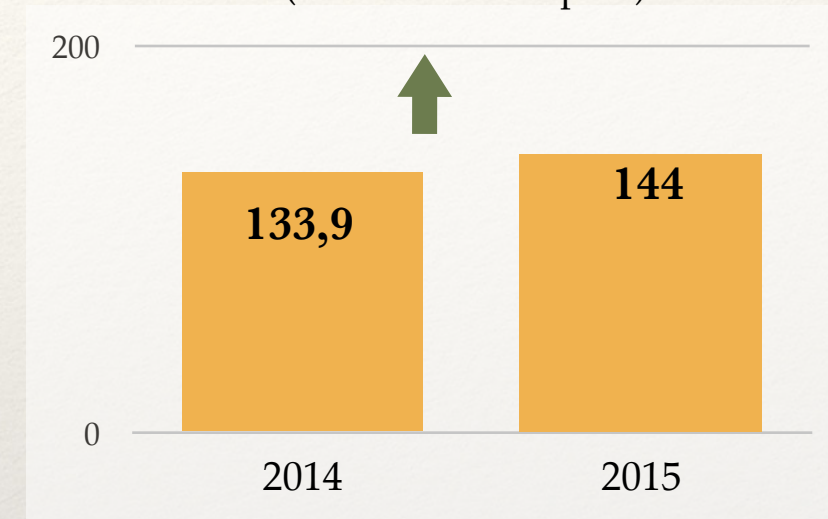
Kinerja Sektor Pariwisata

Kinerja sektor pariwisata yang diukur dalam empat komponen berhasil meningkatkan perolehan devisa dan memperluas kesempatan kerja. Yang diperlukan ke depan adalah memastikan target tercapai, bahkan dilampaui.

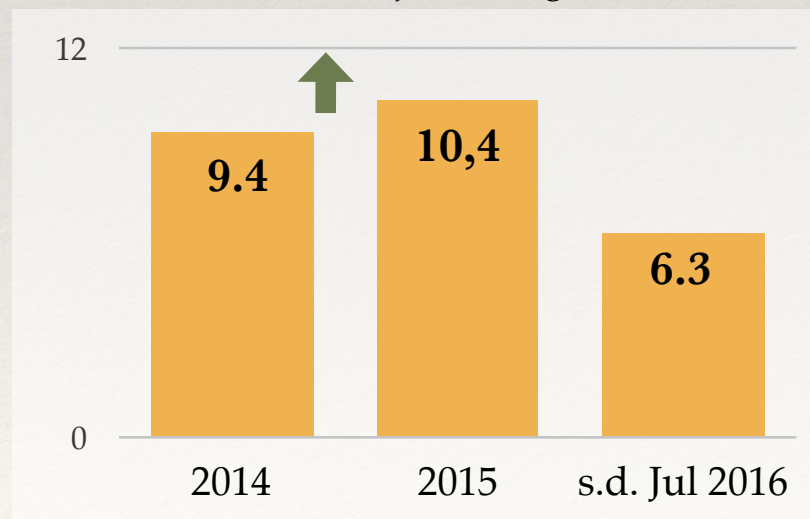
Kunjungan Wisnus
(dalam juta orang)



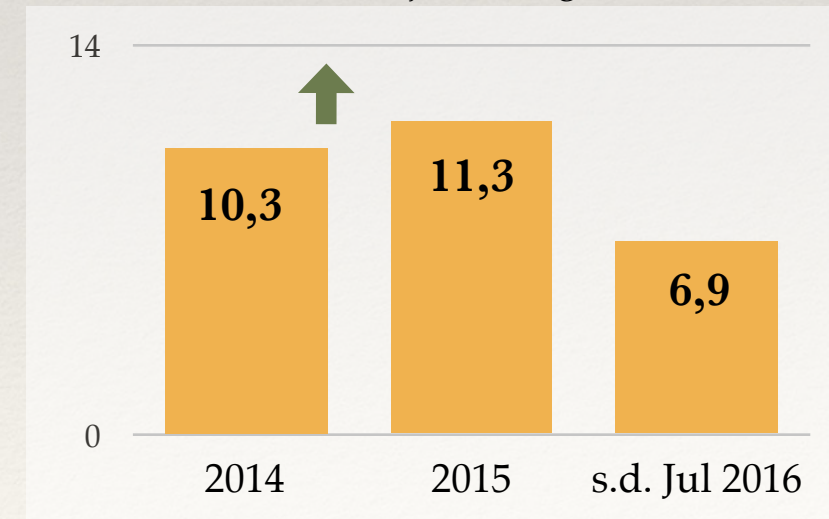
Perolehan Devisa
(dalam triliun rupiah)

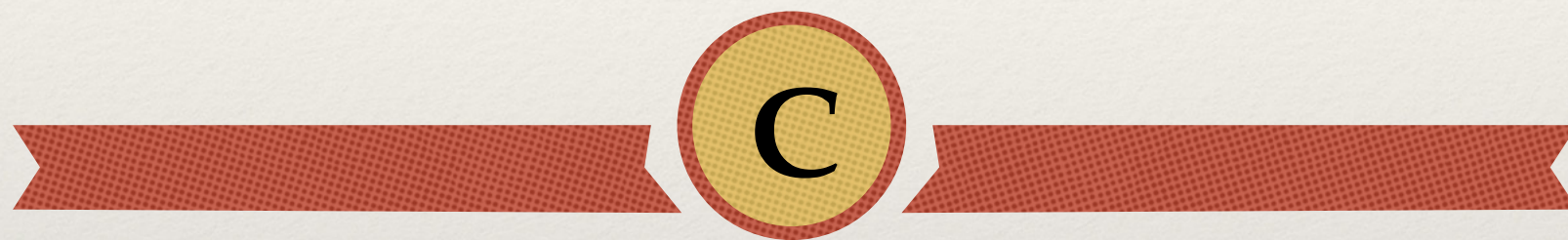


Kunjungan Wisman
(dalam juta orang)



Jumlah Tenaga Kerja
(dalam juta orang)

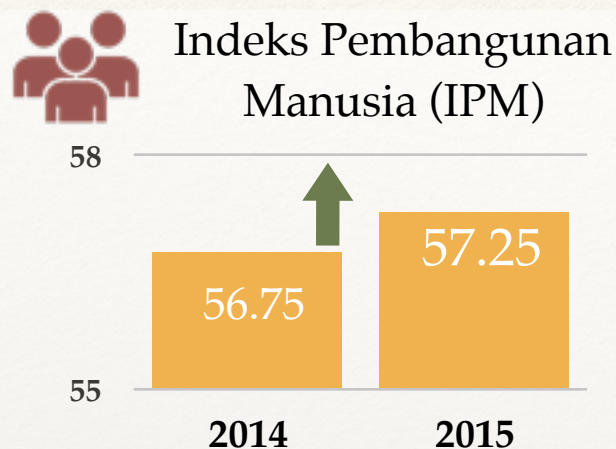




PAPUA

Pendekatan Komprehensif untuk Papua

Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua akan tercapai bila terdapat keseimbangan dalam pembangunan, antara proyek-proyek fisik dengan pendekatan kemanusiaan.



ANGGARAN DAERAH 2016

Papua		Papua Barat	
43,6 Triliun	15% ↑	16,5 Triliun	10% ↑

KESEHATAN

3.600.162 jiwa menerima kartu indonesia sehat
26 Program nusantara sehat di Papua dan Papua Barat
Menurunnya penghidap penyakit malaria sebanyak **2.744** jiwa

INFRASTRUKTUR

22 Pembangunan Pasar Mama-mama
4.480,05 km jalan baru di Papua dan Papua Barat.
3 Terminal baru bandar udara
3 Kapal fery baru

PENDIDIKAN

358.617 Penerima Kartu Indonesia Pintar
10 Sekolah baru berpola asrama
25 Pembangunan Sekolah Garis Depan
33 Sekolah menerima bantuan Ruang Kelas Baru
500 Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
45 Pembangunan perpustakaan dan pusat sumber belajar
646 Guru Garis Depan
40.166 guru menerima bantuan Program Peningkatan Karir
141 guru mengikuti program pertukaran kepala sekolah
336 guru menerima bantuan Program Kualifikasi S1 dan S2

Pengakuan Terhadap Hak Komunal Tanah Adat

Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat adat, untuk pertama kalinya pemerintah memberikan sertifikat tanah komunal adat kepada masyarakat adat di Papua Barat.



PERTAMA KALI DALAM SEJARAH INDONESIA

Pemerintah Akui Hak Komunal Sembilan Daerah Masyarakat Adat Papua

Hindari Sengketa Dengan Pengusaha, Hak Komunal Diberikan Kepada Masyarakat Adat

Trio Rendra Nasional 31 Januari 2015 10:01 dibaca 1217x



Sumber: merauke.go.id

Tanah Adat Masyarakat Papua Barat Disertifikasi

Rabu, 27 Jul 2016 20:37 WIB

#pertanahan

News

Daerah



TWITTER



FACEBOOK



GOOGLE+



Sumber: metromerauke.com

Perkembangan Infrastruktur untuk Menyatukan Papua

Pembangunan infrastruktur di Papua, dilakukan terutama untuk menghilangkan perbedaan harga barang yang mencolok dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.



Pelabuhan Sorong



Bandar Udara Werur



Pelabuhan Depapre



Lantamal XIV Sorong



Bandara Wamena



Jalan Papua



Pelabuhan Perikanan
Merauke



Infrastruktur Perbatasan



Jembatan Holtekamp



Bandara Sorong

Peningkatan Produktivitas Melalui Pertanian dan Perdagangan

Selain infrastruktur dan manusia, kemajuan Papua ditentukan pula oleh produktivitas lokal terutama dengan mendorong produksi pertanian dan perdagangan.

Pembangunan pasar Mama-mama di Papua dan Papua Barat:

- Peningkatan menjadi **25** unit pasar (2015-2016), sebelumnya berjumlah **3** unit pasar (2013-2014)
- Pembangunan pasar melibatkan “Mama-mama Papua” yang tidak hanya menjadi ibu dari anak-anak asli Papua, namun juga merupakan tulang punggung perekonomian keluarga yang secara tidak langsung menjadi penggerak perekonomian di Papua.



Penurunan harga BBM di Wilayah Pegunungan Papua di pegunungan Papua

- Kebijakan Presiden Jokowi menetapkan “one price policy” yang berlaku di seluruh Indonesia termasuk Papua berhasil mendorong pembukaan agen penyaluran minyak dan solar (APMS) serta pembangunan SPBU telah menurunkan harga bensin dan solar menjadi sama dengan daerah lainnya di Indonesia.
- Dimulai dari Kabupaten Puncak, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mamberamo, dan Kabupaten Nduga.



Pasar Phara Sentani



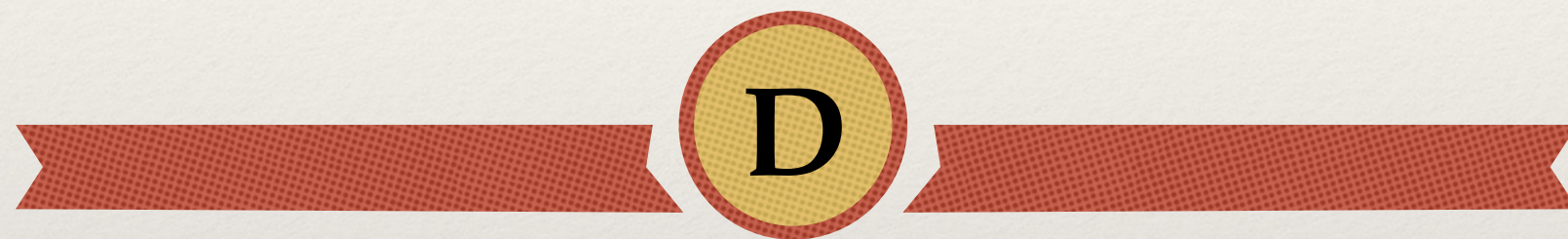
Pasar Doyo Baru



Pasar Rufei



Pasar Mama-mama



REFORMA AGRARIA

Tujuh Tujuan Reforma Agraria

Reforma Agraria memberikan kepastian hukum kepemilikan lahan, mencegah krisis ekologi, mengatasi konflik, mengurangi kemiskinan, dan menurunkan ketimpangan ekonomi di pedesaan.



Cita-cita Reforma Agraria

Terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam.

Misi Reforma Agraria

Meningkatkan kepastian hak-hak kepemilikan dan penguasaan rakyat petani atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, dan berkurangnya kasus-kasus konflik agraria

Memperbaiki layanan ekologi melalui penatagunaan tanah secara berkelanjutan

Membentuk badan-badan usaha kooperatif yang menjadi kekuatan produktif baru di desa-desa

Meningkatkan kesejahteraan rakyat petani peserta program reforma agraria.

Strategi Reforma Agraria

Memampukan desa dalam mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat petani secara bersama.

Sasaran Reforma Agraria

Reforma Agraria menyasar lahan-lahan HGU yang terlantar dan tanah-tanah negara yang tidak termanfaatkan untuk didistribusikan kepada para buruh tani, sekaligus memberi legalisasi atas tanah-tanah negara.

Sasaran reforma agraria selama 2 tahun (2014-2016) dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah program redistribusi dan legalisasi (sampai dengan 31 Agustus 2016).



Legalisasi diselenggarakan atas tanah-tanah yang sebelumnya dijadikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan tanah rakyat miskin lainnya

Tahun 2015:
Realisasi Legalisasi Aset
836.921 bidang
± 188.307 ha

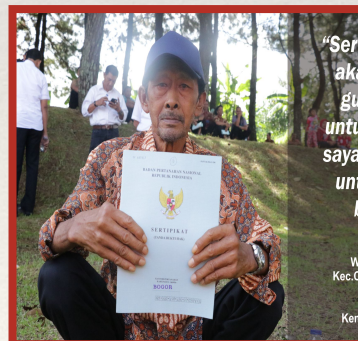
Tahun 2016:
Target Legalisasi Aset
1.050.073 bidang
± 236.266 ha



Redistribusi tanah dilakukan pada tanah-tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang habis masa berlakunya, tanah terlantar dan tanah negara lainnya

Tahun 2015:
90.829 bidang,
(± 63.985 ha)

Tahun 2016:
175.000 bidang,
(± 123.280 ha)



Identifikasi tanah terlantar

Tahun 2015:
Target 119,
terrealisasi 91

Tahun 2016:
Target 205,
terrealisasi 66



Penanganan sengketa dan konflik agraria

Tahun 2015:
932 kasus,
515 kasus selesai.

Tahun 2016:
2.642 kasus,
251 kasus selesai.

Peta Jalan Reforma Agraria

Implementasi Reforma Agraria dijalankan secara komprehensif mulai dari Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik, hingga ke Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

Perpres No.45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2017 (14 Mei 2016):

- Sebagai upaya mengakselerasi capaian dari pelaksanaan reforma agraria, 14 Mei 2016 telah diterbitkan Perpres No.45/2016 tentang RKP 2017 yang di dalamnya menempatkan reforma agraria sebagai prioritas nasional, mencakup program:

Penguatan Kerangka
Regulasi dan
Penyelesaian Konflik

Kelembagaan Pelaksana Reforma
Agraria Pusat dan Daerah

Penataan Penguasaan dan Pemilikan
Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pemanfaatan Tanah Obyek Reforma
Agraria (TORA)

Kepastian Hukum dan Legalisasi
atas Tanah Obyek Reforma Agraria
(TORA)

Rapat kabinet terbatas tentang reforma agraria (24 Agustus 2016):

- Pesan utama Presiden Joko Widodo dalam Ratas Reforma Agraria: di pedesaan, masalah kemiskinan, ketimpangan dan sulitnya lapangan pekerjaan merupakan problem pokok dan mendasar yang dihadapi masyarakat. Reforma agraria yang digulirkan pemerintah berupaya untuk mengatasi ketiga masalah tersebut.
- Presiden Jokowi memerintahkan untuk segera mempercepat program reforma agraria ini, dengan fokus redistribusi lahan pada buruh tani yang tidak memiliki lahan dan petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,3 hektar.
- Presiden mengarahkan: "Semangat reforma agraria ialah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam".

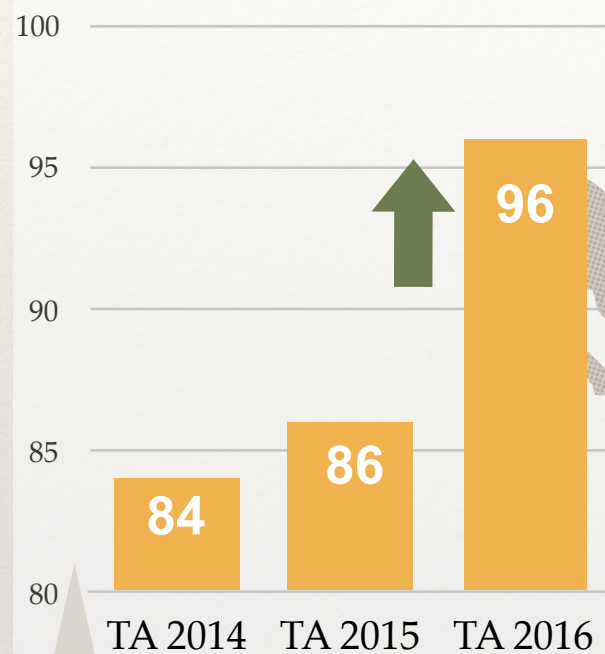


POROS MARITIM

Trayek Bertambah, Harga Turun

Perbedaan harga antarwilayah berubah drastis sejak dijalankannya trayek tol laut. Harga menjadi semakin stabil dan turun secara signifikan ketika jumlah trayek ditambah dan direvisi sesuai dengan kebutuhan

PENINGKATAN TRAYEK ANGKUTAN PERINTIS



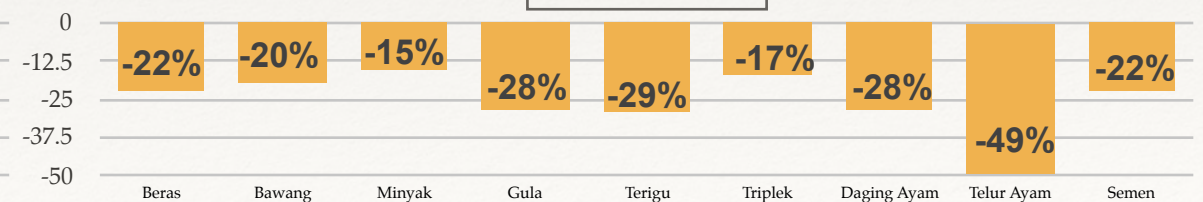
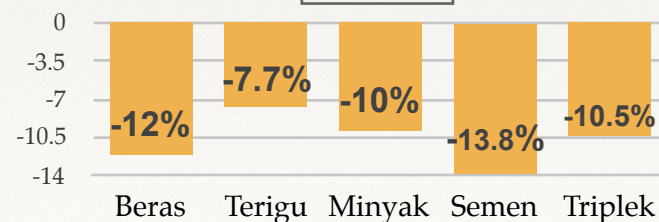
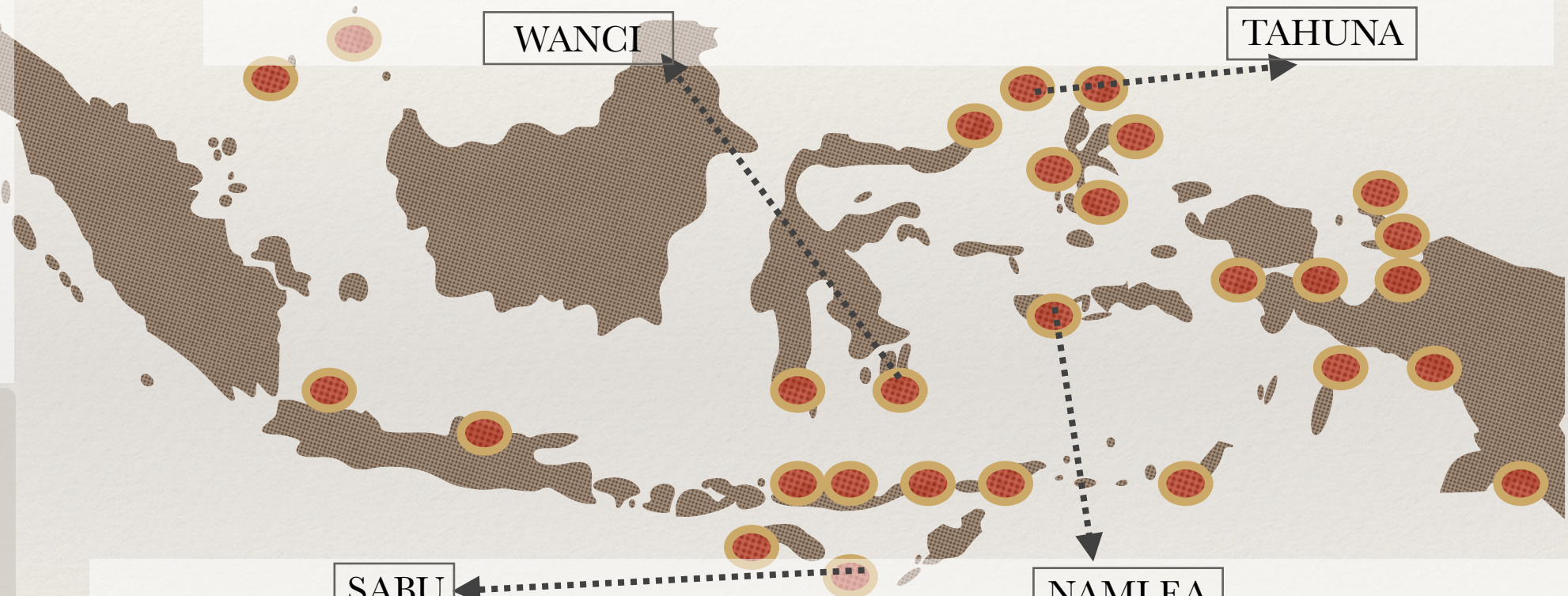
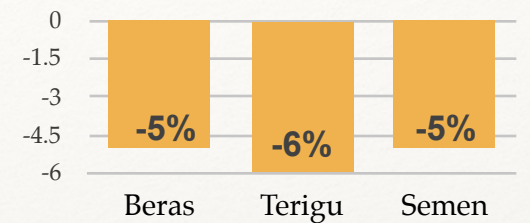
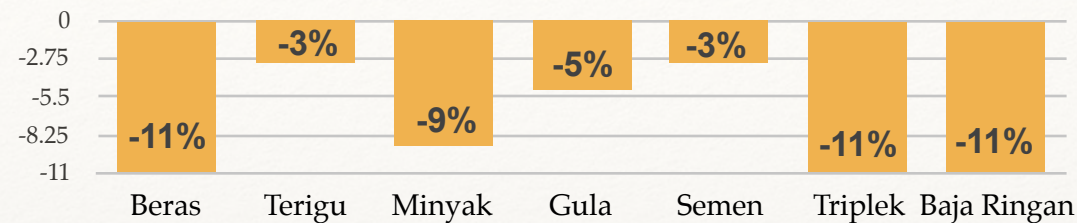
- +1** Trayek khusus angkutan ternak
- 54** Trayek dilayani oleh kapal negara
- 42** Trayek dilayani oleh kapal swasta

Sumber: Capaian Program Poros Maritim Dunia (Kementerian Perhubungan, 9 September 2016)



DAMPAK

PENURUNAN HARGA KOMODITAS

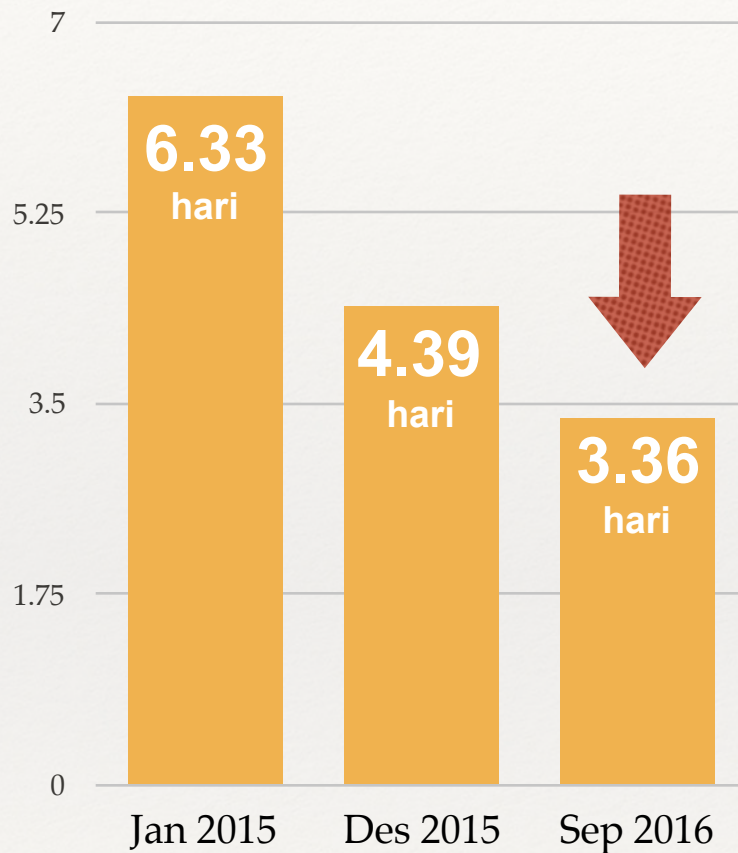


Sumber: Pelaksanaan Program Tol Laut Sesuai Perpres 106/2015 (Kemenko Maritim, 13 September 2016)

Ekspor-Impor Efisien, Daya Saing Naik

Perbaikan manajemen kepelabuhanan, penerapan teknologi, pembenahan SDM, menurunkan waktu inap (*dwelling time*) di pelabuhan, dan mempersingkat waktu tempuh serta menurunkan biaya ekspor secara signifikan

WAKTU PROSES KEPELABUHANAN (*DWELLING TIME*) TURUN



Sumber: Laporan Capaian Program Poros Maritim (Kemenko Maritim, 9 September 2016)

JALUR EKSPOR SEMAKIN PENDEK

Penambahan Jalur Pelayaran Internasional pada Pelabuhan Makassar Mengurangi Waktu Ekspor Wilayah Timur Indonesia



Ke China: **24** hari menjadi **16** hari

Ke Japan: **28** hari menjadi **18** hari

Ke Korea: **26** hari menjadi **17** hari

Makassar-Jakarta-Bintulu-Manila-Batangas-Xiamen-Tokyo-Yokohama-Nagoya-Osaka-Busan-Hongkong-Shekau-Manila-Cebu-Makassar

Sebelum
Sesudah

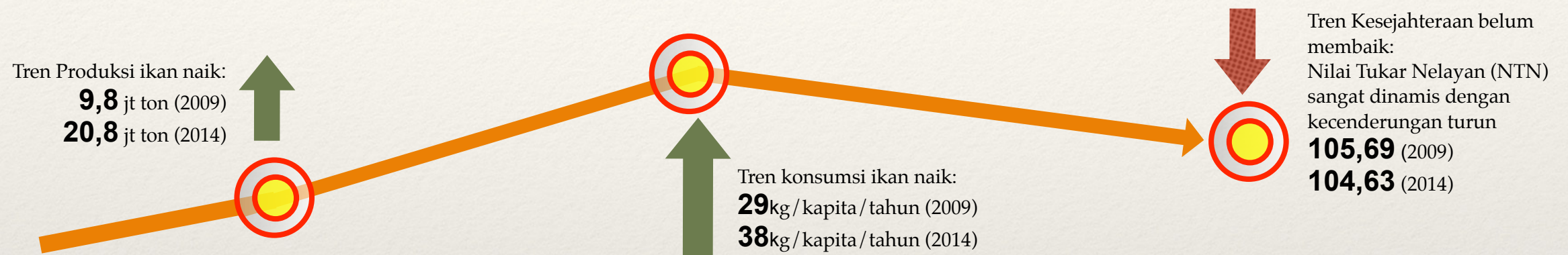
Biaya per Kontainer berkurang sebesar
USD. 200

Sumber: Capaian Program Poros Maritim Dunia (Kementerian Perhubungan, 9 September 2016)

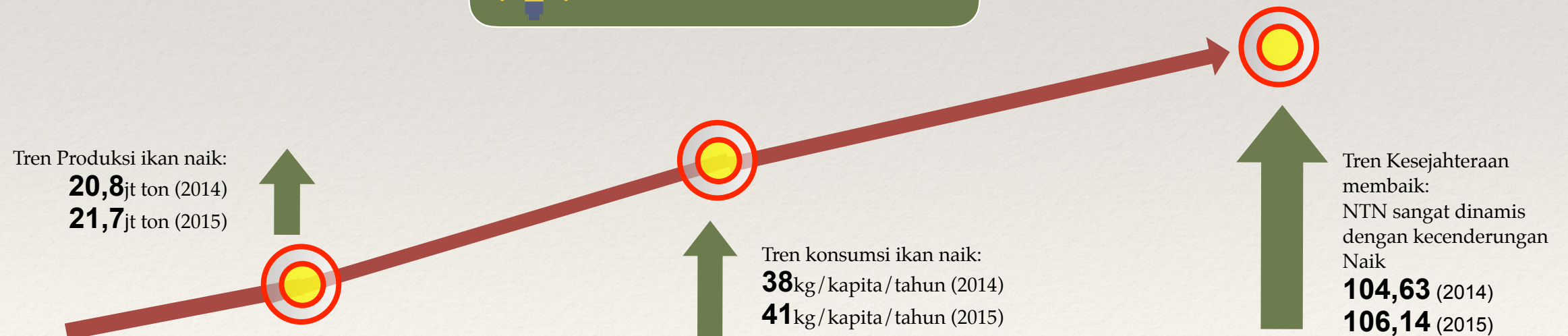
Produksi dan Kesejahteraan Naik

Produksi ikan Indonesia tidak pernah menurun dari waktu ke waktu. Yang membedakan adalah, sekarang ini kesejahteraan nelayan meningkat karena perbaikan pada tata kelola perikanan.

Masa lalu: EKSPLOITATIF (2009-2014)



Masa kini: INOVATIF



Perubahan Mendasar dalam Kebijakan Kelautan Indonesia

Untuk pertama kali sejak merdeka, Indonesia segera memiliki Kebijakan Kelautan Indonesia dan Tata Ruang Laut Nasional. Keduanya akan menjadi tonggak bersejarah untuk membangun menjadi poros maritim dunia.



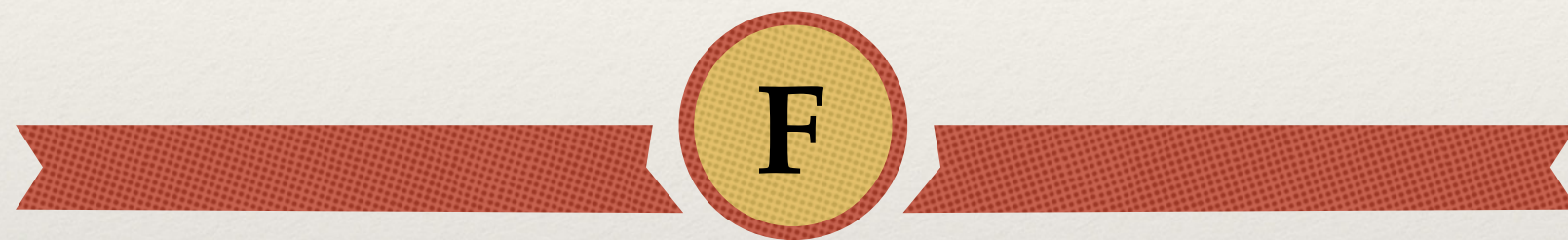
Untuk pertama kali setelah **71** tahun merdeka, Indonesia segera memiliki Kebijakan Kelautan Indonesia (*Ocean Policy*):

1. Narasi besar Poros Maritim Dunia.
2. Peta jalan menuju Poros Maritim Dunia.
3. Pembiayaan menjadi Poros Maritim Dunia.



Untuk pertama kali setelah **71** tahun merdeka, Indonesia segera memiliki Tata Ruang Laut Nasional:

1. Mencegah konflik perebutan ruang laut.
2. Memastikan keadilan pemanfaatan ruang laut.
3. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya laut.
4. Memastikan keberlanjutan sumber daya.



PENGAMPUNAN PAJAK

Berdikari Membangun Negeri

Pajak adalah tumpuan utama pembangunan. Optimalisasi pajak salah satunya dilakukan melalui pengampunan pajak. Tujuan utamanya adalah memperluas basis data wajib pajak sehingga memberikan ruang fiskal yang lebih besar.



Keberhasilan Pengampunan Pajak **mendorong kepercayaan dunia bisnis dan memperluas basis pajak** sehingga dalam jangka panjang akan **memberikan ruang fiskal yang lebih besar**



Dominasi peserta dari kalangan Orang Pribadi Non UMKM menunjukkan bahwa program ini telah **tepat dengan sasaran** yang diharapkan.

Target, Tantangan, & Respons

- Mencapai tujuan Program Pengampunan Pajak sebagaimana tercantum dalam Undang-undang
- Adanya lonjakan peserta Pengampunan Pajak menjelang berakhirnya periode pertama:
Penambahan titik pelayanan dan menyiapkan langkah-langkah persiapan pelayanan beban puncak

97,3

Triliun

(Sesuai dengan SSP)

Uang Tebusan

01/07/2016 sampai dengan 30/09/2016

Jumlah Wajib Pajak Peserta Amnesti



WP Lapor SPT
301.182



WP Tidak Lapor SPT
66.271



WP Daftar Sebelum TA
2.901



WP Daftar Pasca TA
15.823



WP Tidak Bayar
118

**Kinerja sampai dengan
30/09/2017**

Total Deklarasi Harta:

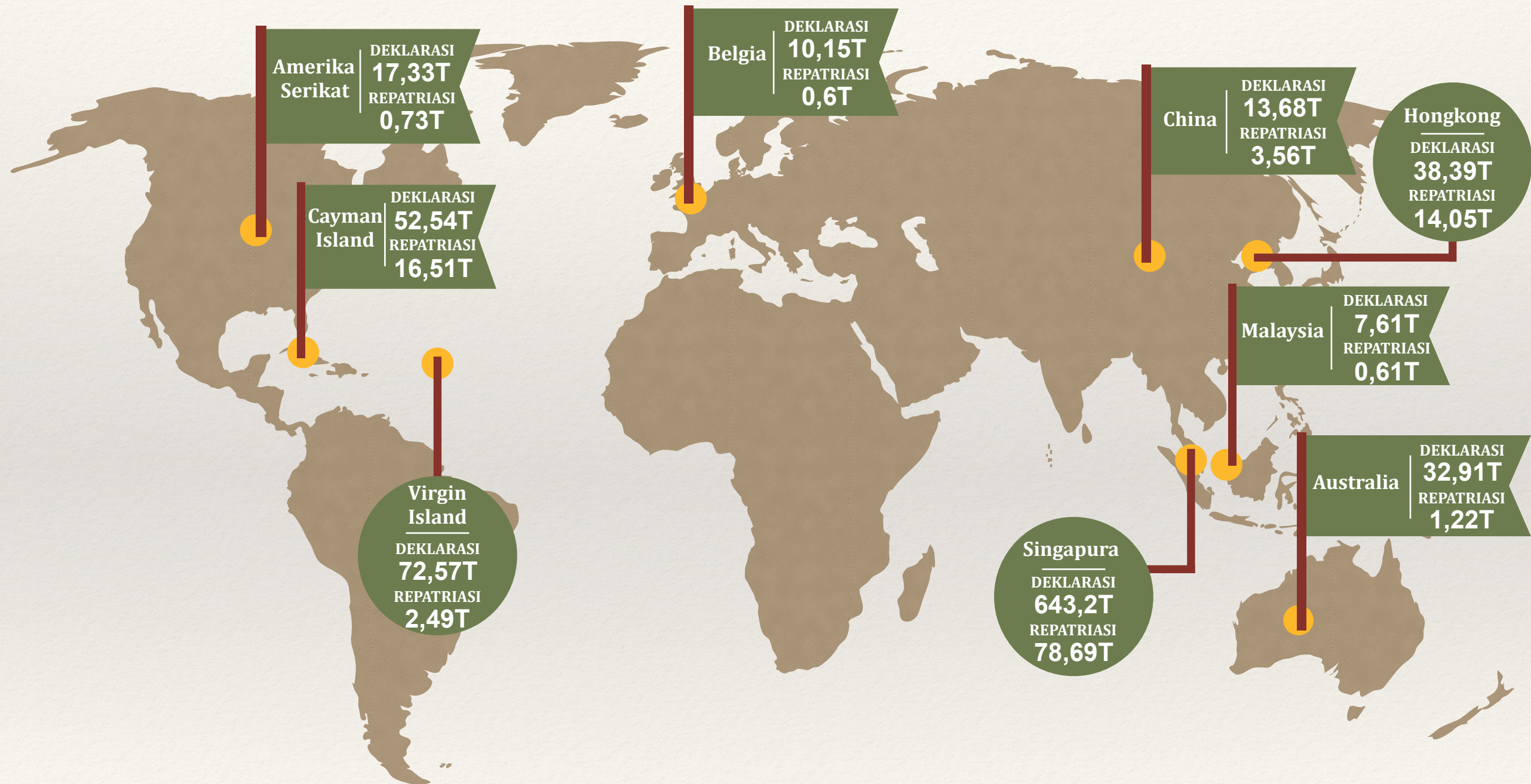
3.485 Triliun

• Repatriasi: **137** Triliun

Jumlah SPH: 367.453

Deklarasi dan Repatriasi 9 Negara Terbesar

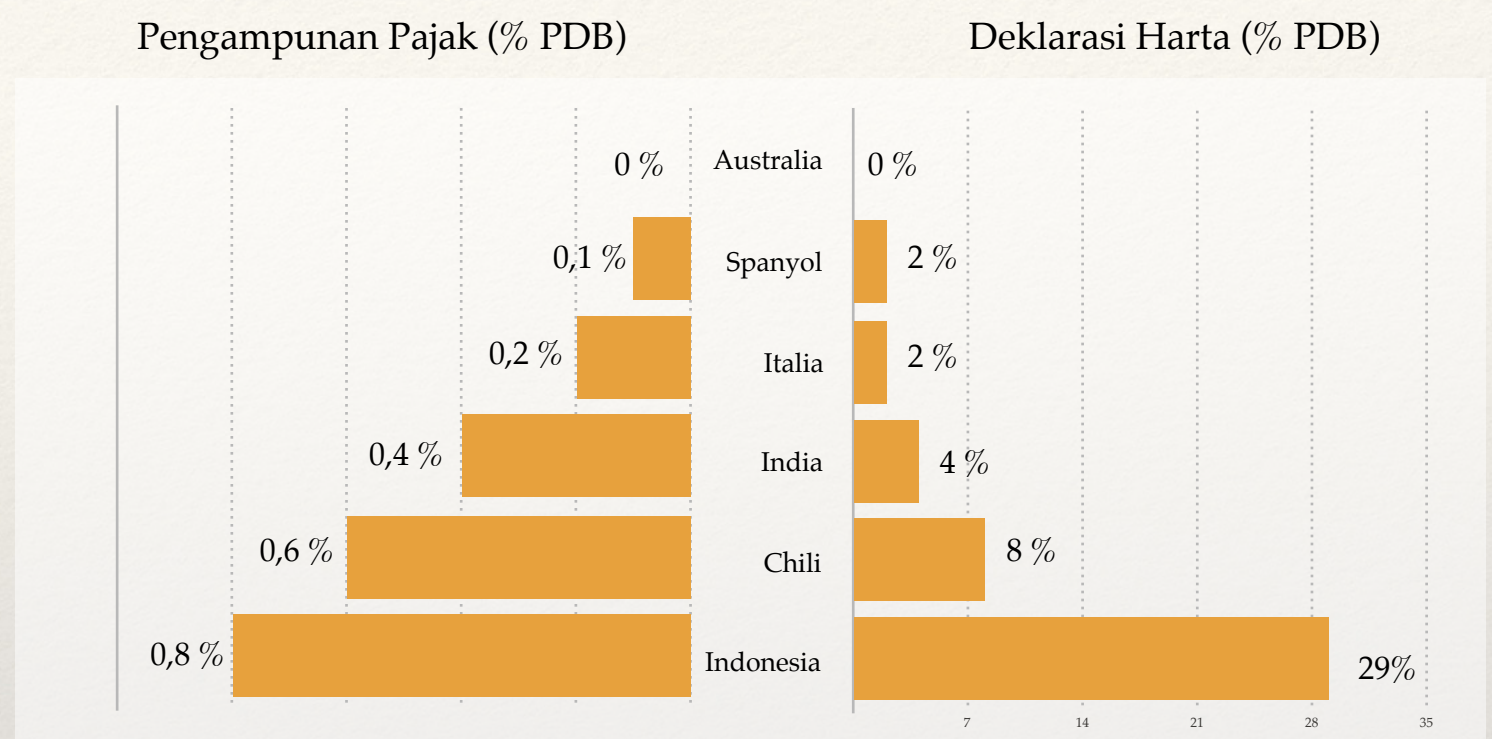
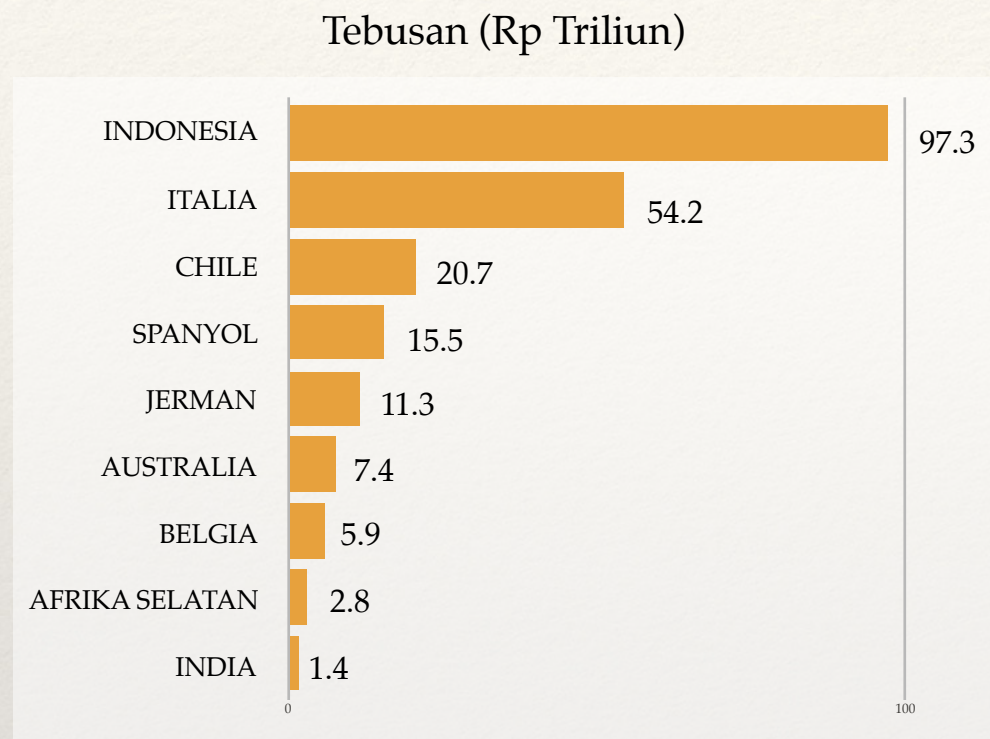
Dana repatriasi dari negara-negara berikut ini akan menjadi basis implementasi dan reformasi perpajakan selanjutnya. Indonesia sedang menyiapkan implementasi kesepakatan *Automatic Exchange of Information* dengan seluruh negara mitra.



Sumber : Kementerian Keuangan, Deutsche Bank, Bank Dunia, Diolah

Capaian Pengampunan Pajak Tertinggi di Dunia

Sampai dengan periode pertama program pengampunan pajak, hasil yang dicapai dalam program ini termasuk yang tertinggi di seluruh dunia, tersukses dari segi target, dan terus naik signifikan.



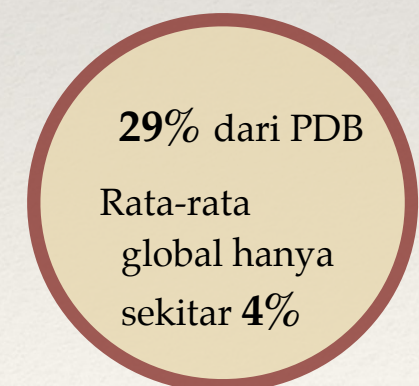
Capaian Pengampunan Pajak



Repatriasi



Deklarasi Harta





DESA DAN KAWASAN 3T

Membangun Desa, Membangun Negeri

Pembangunan dari pinggiran, khususnya pembangunan Desa, pemerintah terus berupaya meningkatkan percepatan pembangunan di desa menjadi desa mandiri.

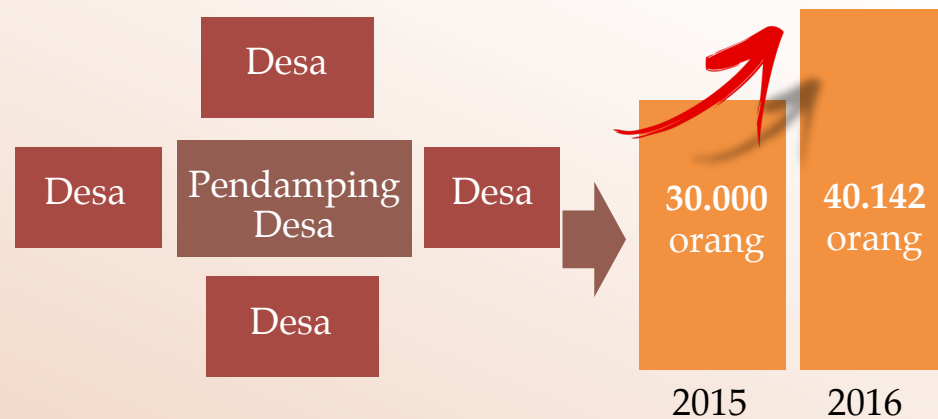
Perbaikan dan Peningkatan Pelaksanaan Dana Desa

Mekanisme pencairan dari 3 tahap menjadi 2 dengan tetap menjaga kualitas kegiatan di desa

40%:40%:20%

60%:40%

Penempatan pendamping desa:
setiap 4 desa disediakan 1 orang pendamping desa



Pemanfaatan Dana Desa
dititikberatkan pada
pembangunan fisik.

75,2%

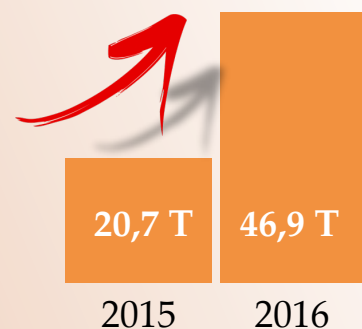
70%

2015

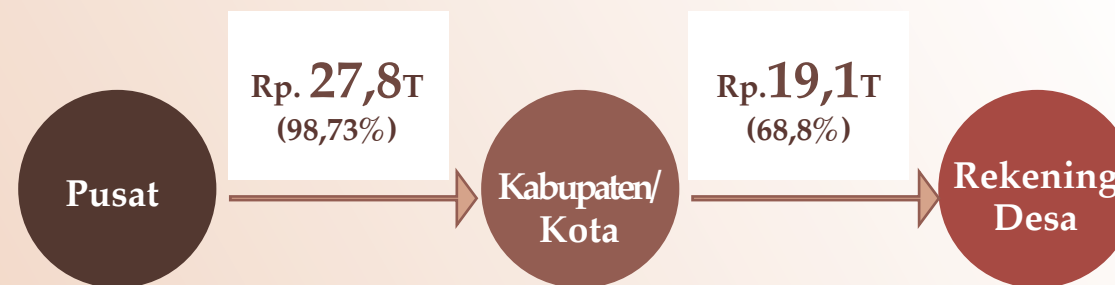
2016

Sisanya adalah pembangunan nonfisik.

Peningkatan pagu dana desa
lebih dari 200%



Realisasi pencairan dan penyaluran dana desa sampai
dengan bulan September 2016



Sumber: Kementerian PUPR

Sistem Informasi Desa untuk Membangun Desa

Pembangunan dari pinggiran, khususnya pembangunan Desa, pemerintah terus berupaya meningkatkan percepatan pembangunan di desa menjadi desa mandiri.



Sumber: Kementerian PUPR

Pembangunan Jalan Perbatasan

Peningkatan kualitas dan pembangunan jalan baru di kawasan perbatasan terus dilakukan di tiga titik yakni Kalimantan, Papua, dan NTT agar menjadi pintu gerbang menuju Indonesia.

JALAN PERBATASAN



Sumber: Kementerian PUPR

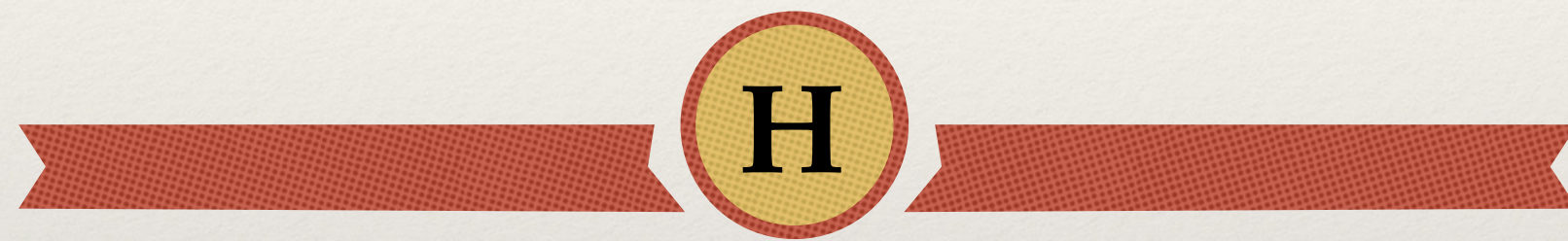
KAWASAN 3T adalah Halaman Depan Wajah Indonesia

Kawasan Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) adalah wajah depan Indonesia yang harus diperbaiki dan didorong kemajuannya, sebagai perwujudan bahwa negara hadir dan melindungi segenap warga .

POS LINTAS BATAS NEGARA



Sumber: Kementerian PUPR



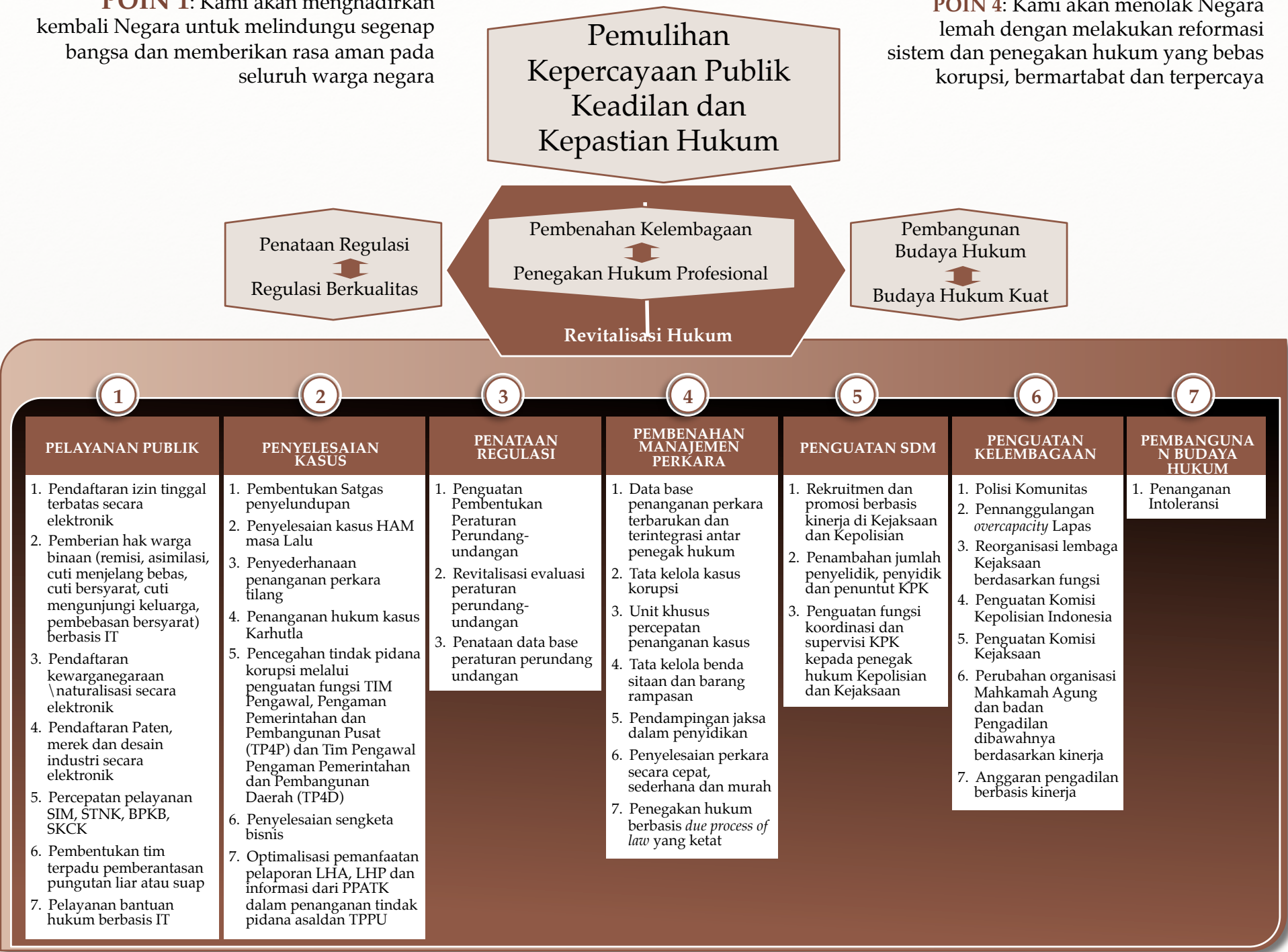
REFORMASI HUKUM

Revitalisasi dan Reformasi Hukum berdasarkan Nawacita

Program revitalisasi hukum menjadi agenda strategis berikut dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

POIN 1: Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

POIN 4: Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya



Penegakan Hukum: Kepolisian

Jumlah kejahatan relatif berkurang pada tahun 2016 (165.147 kasus) dibandingkan tahun 2015 (373.636), meskipun persentase penyelesaiannya sedikit menurun dari 59% ke 58%.

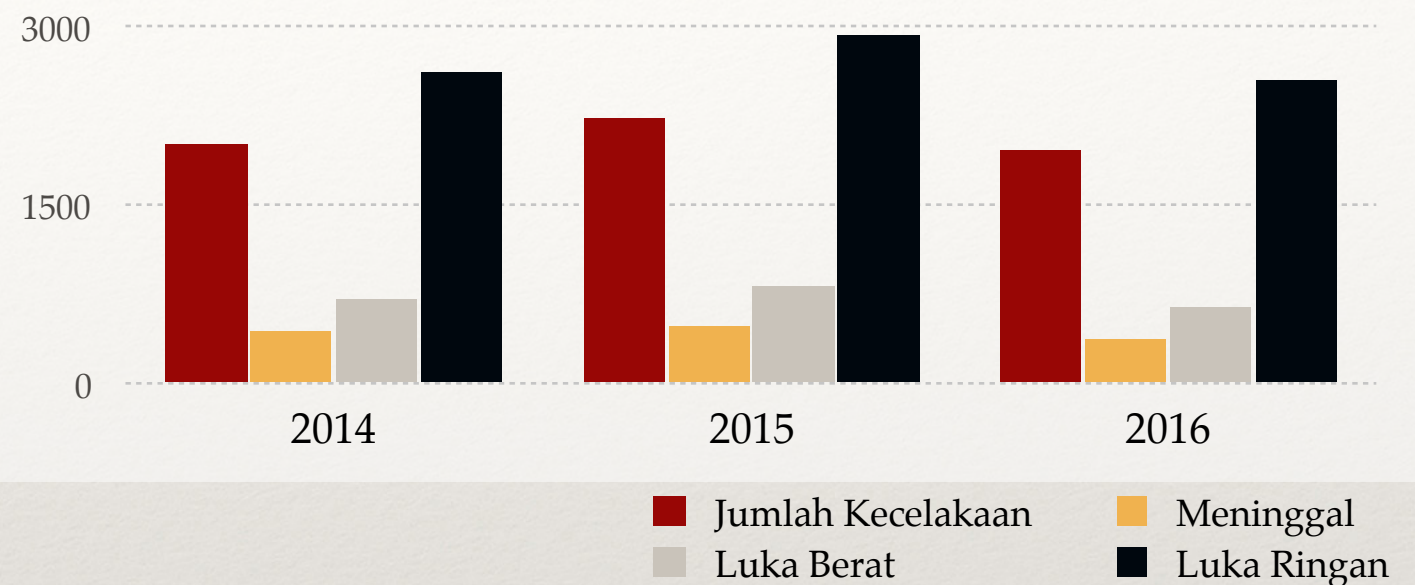
TERORIS

Selama kurun waktu tahun 2015 s/d bulan Juni 2016, telah ditangkap sebanyak 170 tersangka kasus Terorisme

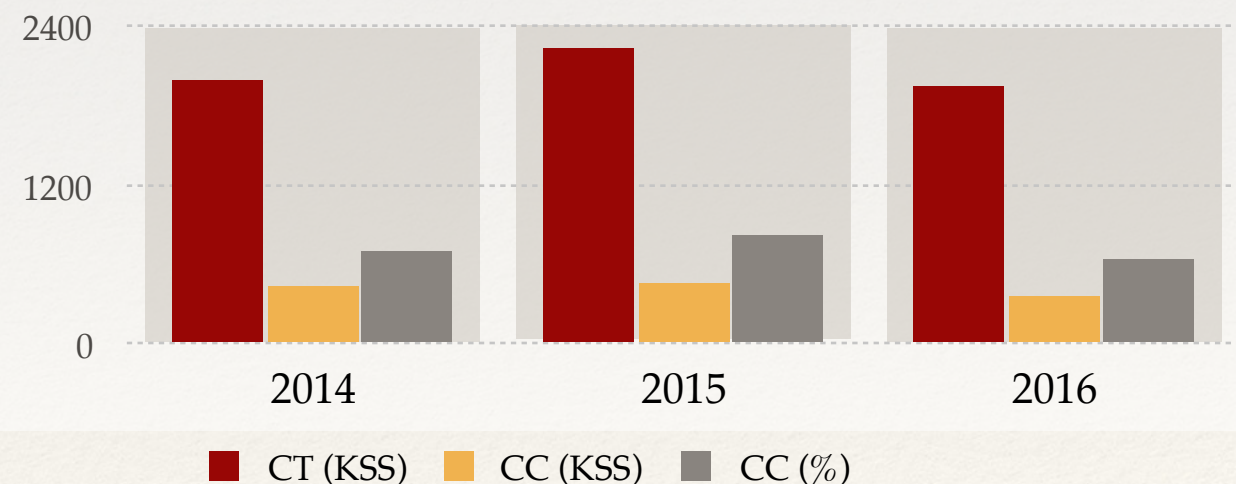
- Hasil giat Kepolisian: 120 Tersangka
- Hasil operasi Camar: 27 Tersangka
- Hasil operasi Tinombala: 23 Tersangka

Tertangkapnya Santoso dan kelompoknya pada 19 Juli 2016.

LAKA LANTAS LEBARAN



PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA



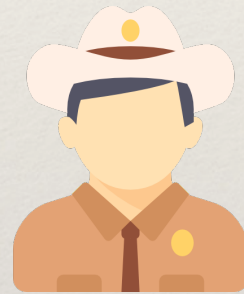
Sumber : POLRI

Penegakan Hukum: Bea Cukai

Penegakan hukum oleh Bea Cukai mengalami peningkatan pada tahun 2016, sedangkan di sisi pelayanan sudah terjadi efisiensi dalam total waktu *pre-clearance*.

KINERJA DJBC DI BIDANG

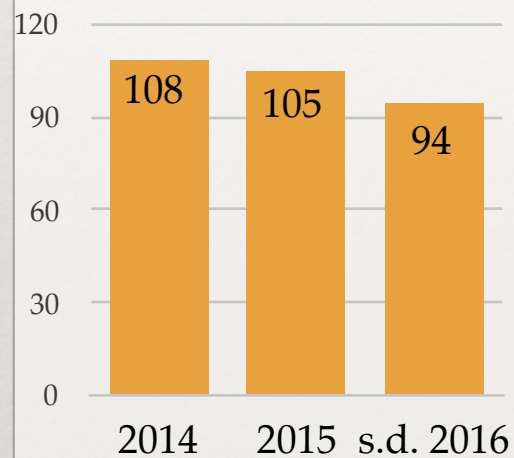
PENGAWASAN



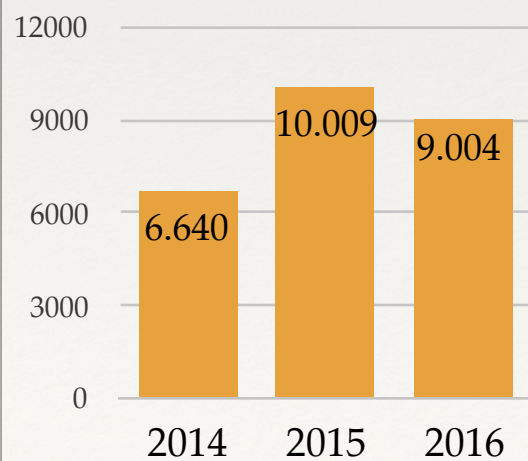
PELAYANAN



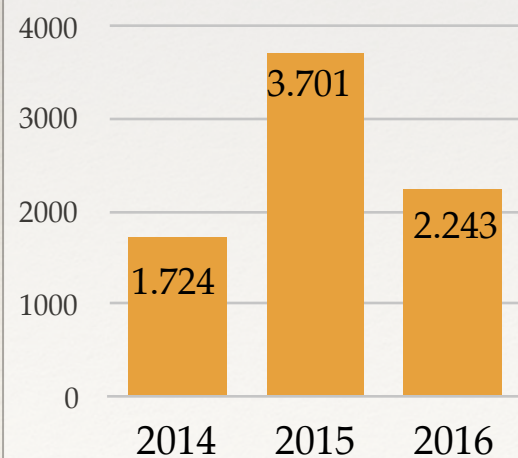
Proses Penyidikan P21



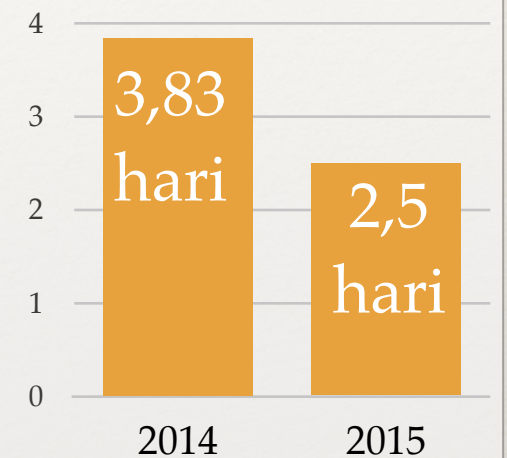
Jumlah Penindakan



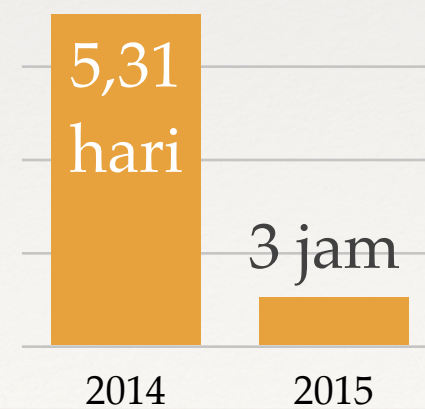
Nilai Barang Hasil Penindakan (Rp Miliar)



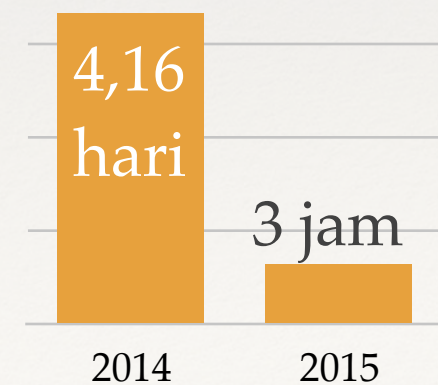
Pre-clearance Obat dan Makanan



Pre-clearance Hewan



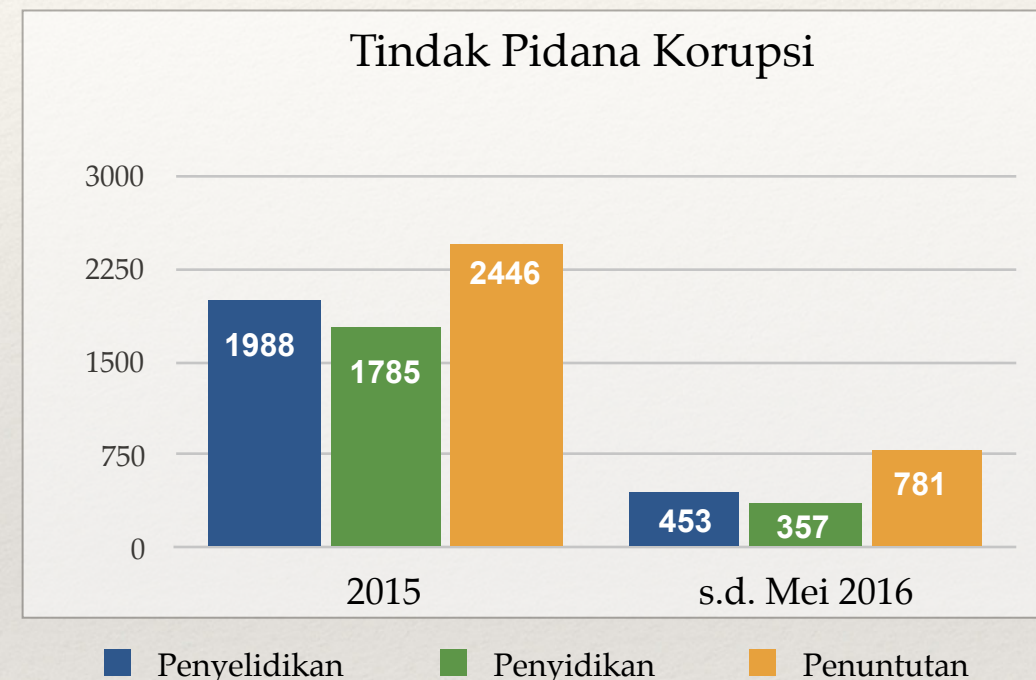
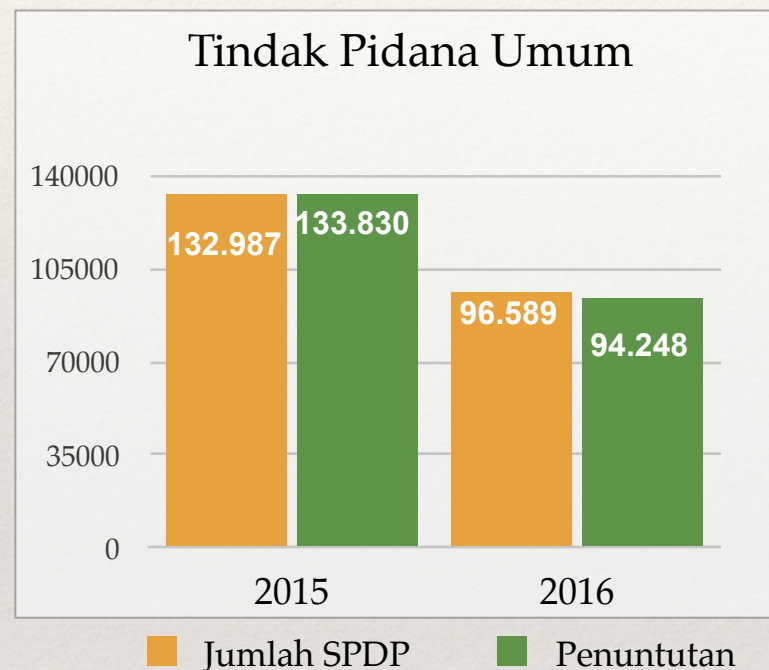
Pre-clearance Tumbuhan



Penegakan Hukum: Kejaksaan

Selama tahun 2016, terjadi peningkatan penyelamatan keuangan negara dibandingkan tahun sebelumnya, namun terdapat penurunan dalam penegakan hukum kasus korupsi.

Dibandingkan tahun 2015, secara umum **penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2016 cenderung meningkat:**



● **Penerimaan keuangan negara (per Agustus) cenderung meningkat**, baik dalam realisasi PNBP dari sektor pembinaan, pemulihan keuangan negara dari sektor perdata dan tata usaha negara, serta penyelamatan keuangan negara dari sektor korupsi. ●

Corruption Perception Index

Indikator utama tingkat korupsi yang diukur melalui Corruption Perception Index (CPI) menunjukkan perbaikan, baik dari segi peringkat maupun skor.

TAHUN 2015

Presiden Jokowi telah menandatangani dokumen Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2015.

TAHUN 2016

Berdasarkan Inpres no .10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2016 dan 2017.

Prioritas untuk tahun 2016 terdapat pada 7 SEKTOR

Penerimaan Negara

Tataniaga Pangan

Pengadaan Barang dan Jasa

Infrastruktur

Sumber Daya Alam/Industri Ekstraktif

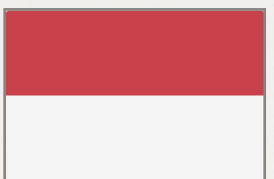
Sektor Swasta

Tatakelola BUMN

Peringkat dan Rangkaian Corruption Perception Index 2015

Peringkat Regional	Peringkat Global	Negara	Skor
2	8	Singapore (Ranking Turun, Skor Turun)	85
9	54	Malaysia (Ranking Turun, Skor Turun)	50
11	76	Thailand (Ranking Turun, Skor Tetap)	38
15	88	Indonesia (Ranking Naik, Skor Naik)	36
16	95	Philippines (Ranking Turun, Skor Turun)	35
17	112	Vietnam (Ranking Naik, Skor Tetap)	31
24	147	Myanmar (Ranking Turun, Skor Naik)	22

INDONESIA



Peringkat Regional



Peringkat Global



Score
36

Sumber : Transparency International